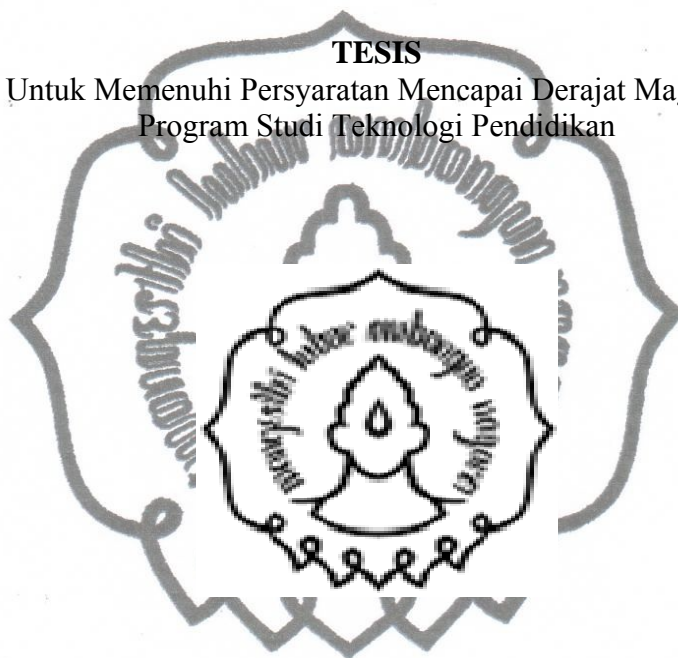


**IMPLEMENTASI
PROGRAM SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(Studi Kasus di SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Teknologi Pendidikan



Oleh:

**SRI MARJOKO
NIM. S 810809315**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

commit to user

ABSTRAK

Sri Marjoko. NIM S810809315. Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) Tingkat SMP (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri). Tesis. Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.

Pembimbing I Prof. Dr. H. Mulyoto, M. Pd. Pembimbing II Prof. Dr. Samsi Haryanto, M. Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang : (1) Pelaksanaan program sekolah standar nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian, (2) Kendala dan cara mengatasi dalam melaksanakan program sekolah standar nasional (SSN), (3) Sejauh mana program sekolah standar nasional (SSN) dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2010/ 2011. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data didapat dari tiga sumber: peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data: pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik cuplikan. Validitas data menggunakan triangulasi dan revidi informan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil temuan penelitian di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan program sekolah standar nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono terlaksana dengan baik sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. (2) Kendala yang dijumpai dapat diselesaikan dengan kemampuan manajemen yang baik oleh sekolah. (3) Pelaksanaan program sekolah standar nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono dapat meningkatkan mutu pendidikan, ditandai dengan peningkatan peringkat sekolah tingkat Kabupaten semakin baik. Tahun pelajaran 2007/2008 peringkat 18 tingkat kabupaten, 2008/2009 peringkat 16 tingkat kabupaten, dan 2009/2010 peringkat 14 tingkat kabupaten dari 75 SMP Negeri. Perolehan nilai rata-rata ujian nasional (UN) juga meningkat, tahun pelajaran 2007/2008 sebesar 7.22, 2008/2009 sebesar 7.53, dan tahun 2009/2010 sebesar 7.57.

Kata Kunci : Sekolah Standar Nasional (SSN)

ABSTRACT

Sri Marjoko. NIM S810809315. Implementation of the National Standard Schools Programme (SSN) Junior High School Degree (Case Study in SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri). Thesis. Educational Technology Graduated Program Sebelas Maret University Surakarta. 2010.

1st Advisors. Prof. Dr. H. Mulyoto, M. Pd. 2nd Advisors. Prof. Dr. Samsi Haryanto, M. Pd.

This study aims to determine a clear picture of: (1) The national standard school program (SSN) in SMP Negeri 2 Jatisrono based on Content Standards, Competency Standards Graduates, Standard Process, Educator Standards and Education Personnel, Equipment Standards, Standard Management, Standard Financing, and Valuation Standards, (2) Constraints and how to overcome in implementing the national standard school program (SSN), (3) The extent to which national standards the school program (SSN) improve the quality of education.

Research carried out in SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri in school year 2010/2011. The research approach used was qualitative descriptive approach. Sources of data obtained from three sources: events, informants, and documents. Data collection techniques: observation participate, in-depth interviews and document analysis. Sampling using purposive sampling with samples technique. The validity of data using triangulation and informant review. The results were analyzed using an interactive model analysis techniques: data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions.

Research findings in SMP Negeri 2 Jatisrono Wonogiri can be concluded: (1) The national standard school program (SSN) in SMP Negeri 2 Jatisrono performing well in accordance with 8 national education standards (SNP) covering the content standards, competency standards, standards processes, standards, educators and education personnel, infrastructure standards, management standards, standards of financing, and valuation standards. (2) Obstacles encountered can be resolved with good management skills by the school. (3) Implementation of a national standard school program (SSN) in SMP Negeri 2 Jatisrono can improve the quality of education, marked with an increase in ranking schools in the district are getting better. 2007/2008 school year 18th rank of districts level, 16th rank of district level in 2008/2009, and 14th rank of district level from 75 Junior High School in 2009/2010. Average value acquisition of the national exam (UN) also increased, in 2007/2008 school year amounted to 7.22, 2008/2009 amounted to 7.53, and 2009/2010 amounted to 7.57.

Keywords: National Standards School (SSN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia banyak mengalami persoalan, antara lain yang menonjol saat ini adalah mengenai mutu pendidikan yang dirasa masih kurang, pemerataan pendidikan, manajemen pendidikan, dan dana pendidikan yang terasa sangat kurang mengingat negeri ini begitu luas dengan banyak penduduk angkatan muda yang membutuhkan pendidikan. Apabila dibanding dengan negara tetangga, semisal Malaysia dan Singapura, mutu pendidikan Indonesia masih jauh dari memadai. Banyak faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita masih kurang tinggi, antara lain kualitas guru dan dosen yang belum semuanya profesional dalam bidangnya; sarana dan prasarana sekolah, terutama laboratorium yang belum lengkap; minat siswa atau maha siswa dalam belajar; proses pembelajaran yang belum bermutu; dan dana pendidikan yang belum mencukupi (Paul Suparno, 2008:1)

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia terbukti dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *International Education Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-39 dari 42 negara peserta.

Masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang lain terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC)

pada tahun 2001, mengenai sistem pendidikan di 12 Negara Asia ternyata Indonesia menduduki peringkat paling akhir di bawah Negara Vietnam.

Keunggulan kita terletak pada melimpahnya sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia (SDM) . Pengalaman negara-negara maju industri di Barat dan di Timur menunjukkan bahwa faktor yang membuat mereka maju bukan kekayaan SDA melainkan penguasaan teknologi, terutama sekali teknologi komunikasi dan informasi. Keunggulan macam ini berarti keunggulan SDM. Teknologi maju tidak mungkin dihasilkan oleh SDM bermutu rendah. Jepang, apalagi Singapura dan Hongkong, negara-negara miskin SDA tetapi maju industrinya, dan maju ekonominya. Dalam konteks pasar bebas/ AFTA negara-negara tersebut kuat daya saingnya. Dalam banyak hal kita lemah, termasuk pendidikan. (Munandir, 2009 : 127)

Ada apa dengan sistem pendidikan nasional, dari fakta yang ada sekarang memang sistem pendidikan nasional di Indonesia sangat jauh dari pendidikan yang berkualitas yang diharapkan banyak pihak. Fakta yang terjadi sekarang pada sistem pendidikan nasional sungguh memilukan, selain dari biaya yang begitu tinggi dan kurikulum yang semrawut, dan efek buruk sekularisasi yang diadopsi dalam sistem pendidikan nasional turut mendistorsi watak anak didik yang sangat memprihatinkan, selain sikap materialistik yang terbangun dari anak didik, juga moralitasnya yang bobrok tidak terlepas dari sistem yang ada. (<http://hizbut-tahir.or.id/2008/07/05/seminar-pendidikan-di-garut/>)

Saat ini, Boediono prihatin dengan sistem pendidikan di Indonesia yang dianggap belum siap dalam menghadapi persaingan global. Boediono kemudian menceritakan, saat melihat sebuah tayangan BBC Knowledge, dia sadar kalau Cina sudah mempersiapkan generasi mudanya dalam menghadapi persaingan global.

Bagaimana pendidikan di Cina dilaksanakan, benar-benar sangat intensif. Ini berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tergolong masih belum siap. “Jadi kalau kita santai-santai saja barangkali akan ketinggalan kereta, ditinggal oleh dunia, dan itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kesalahan kita sendiri”, tutur Boediono. (<http://nasional.vivanews.com/news/read/164792-hadapi-persaingan-pendidikan-harus-disiapkan>).

Menurut Anies Baswedan, pendidikan adalah eskalator bangsa yang akan membawa perubahan terwujudnya Indonesia baru, sehingga mereka yang berada di kelas bawah bisa terangkat derajatnya, dan ikut mempengaruhi kebijakan negara. Pendidikan merupakan alat yang tepat untuk menaikkan derajat seseorang dari sisi sosial ekonomi, bukan tidak mungkin mereka bisa mandiri, dan tidak menggantungkan segala hal pada negara. (<http://nasional.vivanews.com/news/read/164792-hadapi-persaingan--pendidikan-harus-disiapkan>).

Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Menurut Robin Fogarty dalam model Treaded (1991 : 64), pendidikan diibaratkan sebagai benang ulir yang tak putus-putus. Oleh karena itu

peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002 ; dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk ‘... mencerdaskan kehidupan bangsa’.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (*soft ware*) maupun perangkat keras (*hard ware*). Upaya tersebut, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma sentralistik, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah daerah (E.Mulyasa, 2004 :31).

Upaya Departemen Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan ini patut kita acungi jempol. Siapa yang tidak bangga, jika kian bertambah umur bangsa ini kian meningkat mutu pendidikannya. Sebab yang membedakan besar-kecil, maju-terbelakangnya suatu negara, ukurannya adalah majunya pendidikan di

negara tersebut. Namun begitu, upaya serius dalam meningkat pendidikan ini tidak boleh menabrak rambu-rambu. (http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30976&Itemid=62)

Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai dilakukan oleh pemerintah lewat beberapa usaha seperti program sertifikasi guru dan dosen yang menuntut agar minimal guru berkualifikasi S1 atau D4, sedangkan dosen minimal berkualifikasi S2 atau S3. Mereka juga harus mempunyai kompetensi dalam bidang ilmiah, didaktik, komunikasi dengan siswa, dan kepribadian. Beberapa pembenahan gedung sekolah, pembaruan kurikulum yang lebih menekankan siswa dan mahasiswa aktif belajar untuk mencapai standar minimal tertentu, standardisasi pendidikan, dll, dilakukan oleh pemerintah. (Paul Suparno, 2008 :2)

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan seperti penataan undang-undang pendidikan nasional dan berbagai perundang-undangan lainnya. Berbagai program inovatif sebagai upaya reformasi pendidikan antara lain penerapan pendekatan BBE (*Broad Base Education*) atau pendidikan berbasis luas, pendidikan berorientasi keterampilan hidup (*life skill*), pendidikan untuk semua, KBK, MBS, Dewan Pendidikan, Ujian Akhir Nasional, Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Penilaian Portofolio (Isjoni, 2009 : 80).

Selain usaha pemerintah tersebut diatas Isjoni (2009 : 11) menyatakan bahwa Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas *commit to user*

pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar-mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar-mengajar.

Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun kenyataan bahwa, di Indonesia masih banyak sekolah yang berkategori sekolah formal standar atau sekolah potensial, yaitu sekolah yang relatif masih banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akibat dari kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut banyak sektor yang diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah, salah satu sektor yang didekonsentrasikan adalah sektor pendidikan. Berkaitan dengan Undang-undang tersebut maka pemerintah perlu membuatkan acuan dan standar yang bersifat nasional.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 menyebutkan Standar Nasional Pendidikan

commit to user

(SNP) mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Hal ini juga lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk mewujudkan Undang-undang tersebut diperlukan contoh nyata, berupa Sekolah Standar Nasional (SSN).

Sekolah Standar Nasional (SSN) diharapkan menjadi acuan atau rujukan sekolah lain dalam pengembangan sekolah, sesuai dengan standar nasional. Selain itu SSN diharapkan dapat memacu untuk terus mengembangkan diri dan mencapai prestasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. SSN diharapkan juga berfungsi sebagai patok duga (*bench mark*) bagi sekolah dalam mengembangkan diri menuju layanan pendidikan yang baik dan komprehensif (Depdiknas, 2008:3).

Memperhatikan pentingnya upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dengan dilaksanakan program sekolah standar nasional (SSN), maka penulis tertarik untuk meneliti Program Sekolah Standar Nasional (SSN) yang saat ini sedang diimplementasikan di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan program SSN di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri berhasil dengan kategori amat baik dengan nilai 346,00 Tahun 2008 dan memperoleh nilai 356,58 Tahun 2009. Keberhasilan tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut perlu

diketahui, dipahami, dan dijelaskan dengan harapan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program SSN. Karena alasan itulah penelitian dilakukan dengan mengambil judul **“Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama”**.

B. Pembatasan Masalah

Untuk sebuah penelitian banyak memerlukan tenaga, pikiran, pengetahuan, dan dana. Hal itu dengan harapan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Keberhasilan penelitian tidak terletak pada luasnya cakupan masalah, tetapi terletak pada kedalaman penelitiannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka suatu penelitian perlu diberi batasan masalah, agar pembahasannya lebih tepat.

Sesuai dengan identifikasi yang berkaitan dengan implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN), maka penelitian ini difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui program SSN, kendala dan cara mengatasi pelaksanaan program SSN, serta dampak positif program SSN terhadap peningkatan mutu pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan dan harapan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono?
2. Bagaimanakah kendala dan cara mengatasi pelaksanaan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi?
3. Apakah pelaksanaan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kendala dan cara mengatasinya pelaksanaan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak positif penyelenggaraan program SSN dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan umpan balik dan deskripsi nyata tentang pelaksanaan Program Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 2 Jatisrono sebagai
commit to user

tempat penyelenggara pelaksanaan program SSN. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta mendukung teori-teori yang telah ada, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti khususnya tentang pelaksanaan program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tentang pelaksanaan program SSN di SMP, sehingga menjadi acuan dalam pengelolaan bagi SMP yang belum berstatus SSN (SMP Potensial).

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan pengambil kebijakan di sekolah dimana penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program SSN selanjutnya, yaitu menuju Sekolah Standar Nasional Mandiri (SSN Mandiri).
- b. Sebagai acuan guru dalam memperbaiki atau mengevaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran pada sekolah SSN.
- c. Sebagai sarana evaluasi diri bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada sekolah SSN.
- d. Sebagai masukan kepada orang tua atau wali siswa agar dapat memberikan motivasi belajar pada putra putrinya, karena belajar pada sekolah berstatus SSN memerlukan berbagai sarana dan fasilitas memadai.

BAB II

ORIENTASI TEORITIK

Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang terhimpun dalam deskripsi teoritik, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir dari penelitian ini. Adapun uraian secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Deskripsi Teoritik

Deskripsi teoritik ini akan membahas tentang beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu: konsep penyelenggaraan program SSN, kendala dan cara mengatasi pelaksanaan program SSN, dan dampak positif penyelenggaraan program SSN dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun uraian tentang konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Standar Nasional (SSN)

Kajian teori tentang konsep program SSN ini akan membahas tentang Landasan Hukum, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Tujuan Program SSN, dan Indikator Keberhasilan Program SSN. Adapun uraian tentang program SSN adalah sebagai berikut:

a. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan sekolah antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/ 2003) Pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.
- 2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 5). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 6). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- 7). Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

b. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan, yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP tersebut mencakup :

1). Standar Kompetensi Lulusan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal peserta didik, yang mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, yang harus dimiliki untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

2). Standar Isi Pendidikan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3). Standar Proses Pendidikan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.

5) Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

6) Standar Pengelolaan

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7) Standar Pembiayaan (Biaya Operasi Satuan Pendidikan)

Adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian prestasi belajar peserta didik.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sesuai atau menuju kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah merupakan jenjang sekolah yang memiliki

layanan pendidikan minimum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. SMP SSN juga harus mempunyai standarisasi dari kedelapan aspek tersebut secara nasional. Dengan demikian apabila sudah ditetapkan sebagai SSN diharapkan keberadaan SSN di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama (Depdiknas , 2008:5).

c. Tujuan Dilaksanakan SSN antara lain adalah :

- 1) Sebagai rintisan terwujudnya SMP yang memenuhi kriteria minimal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Sebagai rintisan untuk menuju sekolah mandiri sesuai dengan SNP yang memenuhi kriteria sekolah formal mandiri.
- 3) Untuk menjadikan model SMP yang sesuai dengan SNP, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi sekolah sekitarnya.
- 4) Sebagai rintisan sekolah yang menuju Sekolah Standar Nasional.

Adapun sasaran rintisan SMP Standar Nasional (SSN) adalah SMP Negeri dan Swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sebagai SSN.

d. Indikator Keberhasilan SSN

Indikator keberhasilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeteksi keberhasilan program. Untuk program SSN, secara umum indikator keberhasilan secara komprehensif ditetapkan pada akhir program 3 tahunan, adalah sebagai berikut :

commit to user

- 1) Memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap.
- 2) Memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, dari silabus sampai dengan RPP untuk kelas VII-IX semua mata pelajaran.
- 3) Menerapkan pembelajaran kontekstual untuk kelas VII-IX semua mata pelajaran.
- 4) Rata-rata gain score minimal 0,6 dari tahun 1 sampai tahun 3 untuk semua mata pelajaran.
- 5) Rata-rata pencapaian ketuntasan kompetensi minimal 75%.
- 6) Kondisi guru 90% minimal berpendidikan S1 pada tahun ke-3.
- 7) Penguasaan kompetensi, 30% guru bersertifikat kompetensi melalui uji sertifikasi.
- 8) Rasio jumlah rombel dan jumlah kelas 1:1 (tidak boleh double shift)
- 9) Jumlah siswa per rombel maksimal 36 untuk semua kelas.
- 10) Rata-rata jam mengajar guru berkisar antara 20-24.
- 11) Jumlah laboratorium minimal 1 lab IPA, lab. Bahasa, lab. Komputer, dan lab. Keterampilan (minimal sesuai dengan standar sarana).
- 12) Memiliki telepon dan akses internet pada lab. Komputer, guru, dan kepala sekolah.
- 13) Memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BP, ruang TU, kamar kecil yang cukup dan memadai.
- 14) Memiliki ruang perpustakaan termasuk ruang baca.
- 15) Sudah melaksanakan secara konsisten aspek-aspek dalam MBS.
- 16) Memiliki perangkat media pembelajaran untuk semua mata pelajaran sesuai dengan SPM.

17) Sudah melaksanakan sistem penilaian yang komprehensif.

18) Memiliki standar pembiayaan minimal Rp 158.000,00 per bulan per siswa, atau Rp 1.980.000,00 per siswa per tahun (Depdiknas , 2008:8)

d. Strategi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Bagi SSN

Sekolah Standar Nasional (SSN) tentunya sudah memiliki layanan pendidikan yang memenuhi standar tertentu. Dengan demikian SSN tentu telah memiliki input, proses maupun output yang cukup baik. Oleh karena itu, terdapat 5 strategi pengembangan pencapaian SNP bagi sekolah SSN diarahkan kepada 5 aspek, yaitu dengan melaksanakan MBS, mengembangkan inovasi pembelajaran, menciptakan komunitas belajar di sekolah, mengembangkan profesionalisme guru, dan menggali dukungan masyarakat.

(1) Melaksanakan MBS Secara Konsisten

Perubahan MPMBS menjadi MBS dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan dalam perundang-undangan yang menetapkan pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di lembaga pendidikan termasuk SMP. Dalam pelaksanaan MBS, agak berbeda dengan penekanan dalam MPMBS yang terkonsentrasi pada peningkatan mutu. Dalam MBS untuk melihat keberhasilan pelaksanaan ditetapkan rambu-rambu keberhasilan pelaksanaan MBS, antara lain : transparansi, kerja sama, kemandirian, akuntabilitas, dan partisipasi.

MBS lebih menekankan pada proses manajemen yang seharusnya dilakukan di sekolah, agar terjadi kewenangan sekolah dalam mengelola pendidikan, sekolah mampu menyusun dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kondisi objektifnya, terjadi keterbukaan manajemen, terjadi iklim kerja yang baik, dan terjadi kerjasama sinergis antara semua warga sekolah.

(2) Mengembangkan Inovasi Pembelajaran

MBS lebih merupakan wahana untuk mendorong sekolah mampu dan berani melakukan inovasi. Ruang gerak yang diberikan kepada sekolah untuk menyusun program yang sesuai dengan kondisi setempat (kemandirian), pada dasarnya merupakan dorongan kepada sekolah untuk melakukan inovasi. Dengan kata lain, MBS tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan, jika sekolah tidak melakukan inovasi-inovasi, khususnya dalam pembelajaran. Oleh karena itu Sekolah Standar Nasional (SSN) harus mampu melakukan inovasi, khususnya dalam pembelajaran.

Banyak inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan agar proses belajar dapat berjalan efektif, antara lain : kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, pendidikan kecakapan hidup, pembelajaran berdasarkan masalah, dan *quantum learning*. Untuk inovasi pembelajaran di luar kelas, misalnya : lomba karya tulis, lomba olahraga dan kesenian, kepramukaan, bakti sosial, pembelajaran di luar kelas "*out door learning*".

(3) Mengembangkan Lingkungan Sekolah yang Kondusif

Lingkungan sekolah baik fisik maupun lingkungan social harus dapat mendorong komunitas siswa untuk selalu meningkatkan kegiatan belajar, demikian juga dalam konteks social pimpinan sekolah, guru termasuk siswa secara bersama-sama mendorong ke sekolah mengarah pada kondusivitas social untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain lingkungan sekolah (fisik dan non fisik) yang harus dirancang untuk mengembangkan komunitas belajar siswa menuju pada optimalisasi prestasi sekolah, termasuk siswa.

Program kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, dan kekeluargaan dapat diarahkan untuk menumbuhkan situasi sekolah yang kondusif bagi perkembangan komunitas belajar. Disamping itu penciptaan ruang-ruang atau sudut-sudut sekolah yang memungkinkan digunakan oleh siswa untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sekolah.

(4) Mengembangkan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada sekolah standar nasional (SSN), pengembangan guru tidak boleh berhenti pada guru menjadi pandai, tetapi harus sampai guru mampu menunjukkan kinerja profesionalnya, yaitu membimbing siswa dalam belajar. Disamping itu dalam proses pembinaan siswa juga perlu dikembangkan prinsip “learning how to learn”, belajar bagaimana mengejar metode belajar, sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal.

(5) Menggalang Partisipasi Masyarakat

Sekolah standar nasional (SSN) harus berupaya keras menggalang partisipasi masyarakat (termasuk orang tua siswa dan alumni) guna mendukung program sekolah. Pola penggalangan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan sumbangan financial, pemikiran, tenaga, sampai dengan sumbangan material untuk mengembangkan sekolah sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang telah ditetapkan bersama (Depdiknas, 2008 : 33).

2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, bahwa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SMP/MTs./SMPLB/Paket B selengkapnya adalah:

- a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; Menunjukkan sikap percaya diri.
- b. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas; Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional.
- c. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif.
- d. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depdiknas, 2006 : 1).

3. Standar Isi Pendidikan

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP no. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5).

Sekolah harus memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Penyusunan KTSP dibuat secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP melalui kegiatan workshop penyusunan KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan. Aspek dan indikatornya adalah : memiliki dokumen kurikulum, komponen KTSP, dan penyusunan/ pengembangan silabus.

a. Pengertian Kurikulum

Secara bahasa kata “ Kurikulum “ berasal dari bahasa Yunani kuno yang biasa digunakan dalam bidang olahraga yaitu *curir* yang berarti pelari. *Curere* berarti tempat berlari, dan *curriculum* berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari sampai garis finish yang telah ditetapkan. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian awal kurikulum adalah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh surat tanda tamat belajar. Pengertian ini mengandung dua unsur pokok yaitu : 1) Mata pelajaran (Subject matter) dan 2) Tujuan utama pendidikan atau kurikulum (Nana Sudjana, 1994:4)

Menurut Patmodewo (1995 :47) kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar, baik didalam maupun di luar kelas. Batasan ini memperluas makna kurikulum bukan sekedar isi atau mata pelajaran sebagai bentuk pengalaman belajar, untuk memperoleh pengalaman belajar secara *commit to user*

maksimal, tidak hanya berhubungan dengan materi pelajaran namun seluruh aspek yang memengaruhi di sekolah baik fisik, intelektual, sosial maupun emosional.

Berdasarkan uraian tentang definisi dan terminologi tentang kurikulum dapat disimpulkan bahwa kurikulum dikelompokkan menjadi dua yaitu : 1) Kurikulum sebagai konsep yang tertuang dalam program, rencana ataupun harapan, misalnya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2) Kurikulum sebagai pengalaman belajar atau kegiatan nyata pembelajaran, yang meliputi hasil belajar, isi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaan lingkungan belajar.

Kurikulum sekolah standar nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di sekolah standar nasional. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa sekarang dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah (MBS). (Depdiknas, 2007:4).

SMP Negeri 2 Jatisrono dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan di SMP Negeri 2 Jatisrono. Hal ini disesuaikan dengan tujuan sekolah standar nasional (SSN) di SMP 2 Jatisrono yaitu untuk menjadikan model SMP yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat dijadikan rujukan bagi sekolah sekitarnya.

b. Komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, komponen-komponen kurikulum meliputi :

- 1) Tujuan : tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dari kurikulum tersebut.
- 2) Isi materi : pembicaraan isi materi menyangkut pertanyaan apa kandungan isi dari kurikulum (ruang lingkup), criteria yang dipergunakan untuk memilih isi, bagaimana isi atau materi akan dipresentasikan dan criteria apa yang dipergunakan untuk menentukan urutan isi.
- 3) Kegiatan belajar atau pengalaman belajar : merupakan ragam pengalaman belajar yang akan dilakukan dan dialami peserta didik yang tergantung kepada jenis isi materi yang dipelajari. Komponen kegiatan memberikan petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan.
- 4) Evaluasi : merupakan bagian integral dalam pengembangan. Perbaikan dan perubahan kurikulum senantiasa diawali dengan kegiatan penilaian. Pengembangan kurikulum merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian. Lebih lanjut dikemukakan 3 peran evaluasi, yaitu peran evaluasi dalam kurikulum (evaluasi hasil belajar), evaluasi terhadap kurikulum (evaluasi komponen), dan evaluasi proses perbaikan kurikulum (kesenjangan antara kondisi ideal dokumen dengan kenyataan pelaksanaan).

c. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

commit to user

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, artinya dalam penerapan KTSP yang harus diperhatikan adalah perkembangan dan kondisi peserta didik. Kemampuan untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.
- 2) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan pilar belajar untuk, yaitu : a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) memahami dan menghayati, c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- 3) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multi media, sumber belajar dan teknologi yang memadai serta memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.
- 4) Kurikulum dilaksanakan dengan mendaya gunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk menuju keberhasilan tujuan pendidikan yang bermutu.

d. Struktur Kurikulum SMP/ MTs

Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan :

commit to user

- 1) Kurikulum SMP/ MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.
- 2) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/ MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
- 3) Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- 4) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
- 5) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu (Depdiknas, 2006 : 9).

4. Standar Proses Pendidikan

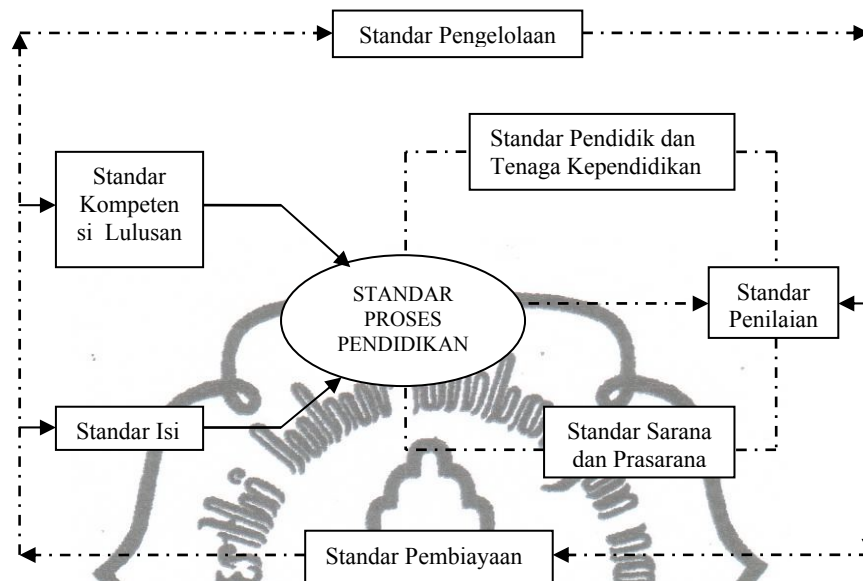
a. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Melalui standar proses inilah setiap satuan pendidikan diatur bagaimana seharusnya proses pendidikan ini berlangsung. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan standar-standar lainnya. Hubungan standar proses dengan standar lainnya digambarkan pada bagan di bawah ini.

Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan

commit to user



Bagan 1
Hubungan antar Standar Proses Pendidikan
dengan Standar Lainnya

Bagan tersebut menggambarkan:

- (1). Standar Proses Pendidikan (SPP) ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Artinya, proses pendidikan yang bagaimana harus dilakukan oleh guru harus sesuai dengan SKL dan SI, baik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, atau SMAN/MAN.
- (2). Efektifitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, di samping SPP perlu juga dirumuskan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK) serta Standar Sarana dan Prasarana (SPP).

(3). Efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh Standar Penilaian (SP).

Dalam SP ditetapkan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.

(4). Keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikan tentu saja sangat tergantung kepada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu juga ditetapkan standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Dari uraian di atas, maka tampak standar proses pendidikan (SPP) merupakan jantungnya dalam sistem pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya standar kompetensi lulusan serta lengkapnya standar isi, namun tanpa diimplementasikan ke dalam proses pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa. (Wina Sanjaya, 2006 : 9-10)

b. Strategi Belajar Mengajar

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik (Mulyasa, 2008:100). Proses dalam konteks ini menunjukkan adanya interaksi antara komponen-komponen dalam lingkup sekolah dan pembelajaran yang mencakup guru, siswa, sumber belajar, dan sarana prasarana.

Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip Sri Anitah Wiryawan (1990 : 1) strategi belajar mengajar merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa adanya istilah

commit to user

lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat dan lingkup mengisyaratkan bahwa strategi belajar mengajar disertai adanya interaksi antara guru dan siswa dalam lingkungan pengajaran tertentu. Strategi belajar mengajar terdiri dari teknik (prosedur) yang akan menjamin siswa benar-benar mencapai tujuannya. Hal ini mengisyaratkan strategi belajar mengajar jauh lebih luas dari metode dan teknik.

Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat dua kegiatan yang sinergis, yakni guru mengajar dan siswa belajar. Sementara siswa belajar bagaimana seharusnya belajar melalui berbagai pengalaman belajar hingga terjadi perubahan dalam dirinya dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektif (Marno dan Idris, 2008:149).

Gaya-gaya pengajaran merupakan pola-pola berpikir dan berinteraksi yang dipelajari (termasuk diajarkan pada diri sendiri) dalam berbagai bidang, dalam hal ini pendidikan. Model-model merupakan pola pengembangan yang diajukan untuk penelitian dan pengembangan. Gaya-gaya tersebut merupakan dasar teknis untuk suatu pekerjaan. Setiap orang mengembangkan gaya yang berbeda dengan pola-pola yang umumnya tetap dan tidak ada bahasa untuk menggambarkan gaya-gaya yang sesuai seutuhnya di seluruh profesi pendidikan (Bruce Joyce, 2008 : 90).

Dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai cara-cara menciptakan kondisi dengan sengaja yang bertujuan memberikan pengalaman belajar dan mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Penerapan strategi berarti merujuk pada penggunaan atau pelaksanaan dari cara-cara pembelajaran yang ditetapkan. Aktivitas di dalamnya melibatkan penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Strategi peran guru, strategi dalam

meningkatkan keterlibatan siswa dan strategi menciptakan lingkungan dan suasana pembelajaran kondusif untuk mempermudah belajar siswa guna mencapai tujuan. Istilah penerapan berarti menunjuk cara-cara melaksanakan kegiatan, latihan, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan untuk melibatkan komponen pembelajaran.

Sebagai sub sistem pendidikan, sekolah memiliki komponen masukan sarana (*instrumental input*), masukan mentah (*raw input*), proses, dan keluaran (*output*) (Soenarwan, 2008 : 18)

c. Model Pembelajaran Sekolah Standar Nasional (SSN)

Model pembelajaran yang dilaksanakan saat ini mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan Bruner, yaitu memberikan pengalaman khusus yang dapat dipahami peserta didik; pengajaran diberikan sesuai dengan struktur pengetahuan/ keilmuan sehingga peserta didik lebih siap menyerap; susunan penyajian pengajaran yang lebih efektif dan dipertimbangkan ganjaran yang sesuai. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional tidak hanya ditekankan pada pencapaian aspek intelektual saja, melainkan dalam pembelajaran perlu diciptakan kegiatan dan suasana belajar yang memungkinkan berkembangnya semua dimensi dalam pendidikan, seperti: watak, kepribadian, intelektual, emosional, dan sosial. Sehingga diharapkan tercapai kemajuan dan perkembangan yang seimbang antara semua dimensi tersebut.

Strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai dimensi di atas, adalah strategi pembelajaran yang terfokus pada belajar bagaimana seharusnya belajar. Strategi ini harus menekankan pada perkembangan kemampuan intelektual tinggi, memiliki kepekaan (sensitif) terhadap kemajuan belajar dari tingkat konseptual rendah ke tingkat intelektual tinggi. Untuk itu metode pembelajaran yang paling sesuai antara lain metode pembelajaran induktif, divergen, dan berpikir evaluatif.

Model pembelajaran pada Sekolah Standar Nasional (SSN) menekankan pada potensi dan kebutuhan peserta didik agar mampu belajar mandiri yang dibangun melalui komunitas belajar tersebut meliputi: (1) meyakini potensi peserta didik, (2) membangun motivasi intrinsik, (3) menggunakan perasaan positif, (4) membangun minat belajar peserta didik, (5) membangun belajar yang menyenangkan, (6) memenuhi kebutuhan peserta didik, (7) mencapai tujuan pembelajaran, dan (8) memfasilitasi pengembangan kelompok.

(<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/02/model-pembelajaran-sekolah-kategori-mandirisekolah-standar-nasional/>)

d. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar menerima pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Dengan pengertian itu, guru atau dosen, buku ajar, dan lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk menuju ke suatu tujuan. Didalamnya terkandung informasi yang dapat *commit to user*

dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi ini mungkin didapatkan dari buku-buku, rekaman, internet, film, mikro film dsb. Semua itu adalah media pembelajaran karena memuat informasi yang dapat dikomunikasikan kepada pebelajar (Sri Anitah, 2009 : 2)

Konsep media pembelajaran memiliki dua segi yang satu sama lain saling menunjang, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan materi atau bahan yang disebut perangkat lunak (*software*). Contoh: bila guru membuat bagan/ tulisan pada suatu transparansi, kemudian diproyeksikan melalui *Overhead Projector* (OHP), maka bahan/ materi pada transparan tersebut dinamakan perangkat lunak (*software*), sedangkan OHP itu sendiri merupakan alat/ perangkat keras (*hardware*).

Dalam memilih media untuk pembelajaran, guru sebenarnya tidak hanya cukup mengetahui tentang kegunaan, nilai, serta landasannya, tetapi juga harus mengetahui bagai mana cara menggunakan media tersebut. Adapun prinsip-prinsip umum penggunaan media adalah sebagai berikut : (1) Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran; (2) Media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber daya; (3) Guru hendaknya memahami tingkat hirarkhi (sequence) dari jenis alat dan kegunaannya; (4) Pengujian media pembelajaran hendaknya berlangsung terus, sebelum, selama, dan sesudah pemakaiannya; dan (5) Penggunaan multi media akan sangat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran.

e. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran

commit to user

Pada masa lalu guru yang baik adalah guru yang memiliki sifat-sifat manusia yang baik. Khususnya di kalangan masyarakat Jawa, guru adalah orang yang “digugu dan ditiru”, atau orang yang dipatuhi dan diteladani.

Pada masa selanjutnya, ukuran guru yang baik sudah lebih jelas. Ukuran-ukuran itu mencakup aspek motivasi berprestasi, motivasi menjadi guru, kecintaan kepada anak-anak, masa kerja sebagai guru, indeks prestasi kumulatif, dan sebagainya. Meskipun ukurannya sudah lebih jelas, tetapi yang diukur adalah karakteristik yang melekat pada diri guru. Padahal, pengamatan dan penelitian, seorang guru dengan karakteristik yang baik belum tentu dapat mengajar dan mendidik dengan baik. Pada tahun 70-an mulai digunakan ukuran baru keberhasilan guru. Ukuran itu adalah *students performance* atau hasil belajar murid. Aspek-aspek yang diukur antara lain capaian belajar murid yang diukur dengan nilai, perbaikan sikap, peningkatan ketrampilan, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya.

Dengan digunakannya ukuran keberhasilan guru yang lebih jelas, terjadilah pergeseran kriteria dari “guru yang baik” ke kriteria “guru yang efektif”. Hasil analisis terhadap banyak penelitian mengidentifikasi 5 perilaku utama dan 5 perilaku pendukung yang dilakukan oleh guru-guru yang efektif (Borich, 1996). Kelima perilaku utama adalah (1) kejelasan dalam mengajar; (2) penggunaan metode pengajaran yang bervariasi; (3) lamanya waktu yang digunakan guru untuk melaksanakan tugas; (4) lamanya waktu efektif yang digunakan untuk mengajar sesuatu bahan ajar di kelas; dan (5) keberhasilan guru membuat murid memahami pelajaran dan menyelesaikan dengan baik tugas-tugas.

Adapun kelima perilaku pendukung terhadap lima perilaku utama adalah (1) kemampuan menggunakan pendapat sumbangan pemikiran murid dalam proses pembelajaran; (2) kemampuan mengajar secara sistematis; (3) kemampuan bertanya; (4) kemampuan menggali pendapat murid untuk memecahkan masalah; dan (5) kemampuan mengajar dengan bersemangat (Haris Mudjiman, 2009 : 113).

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya.

Guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajaran.

Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa.

f. Mutu Pembelajaran

Mutu atau kualitas dari proses pembelajaran dapat ditunjukkan dari kualitas kemampuan, ketrampilan, kecakapan, sikap, dan aspek-aspek psikologi yang lain dari lulusan. Makin tinggi kualitas lulusan akan mencerminkan kualitas yang tinggi pula dari proses pembelajaran. Menurut Jardine dan Wood dalam pandangan sistem, menyatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas pembelajaran merupakan hasil dari sistem yang digunakan; dan sebagai hasil dari sebuah proses, kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh kondisi orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut serta cara mereka bekerja sama (Soetarno, 2003 : 14).

Proses pembelajaran yang terjadi pada diri peserta didik merupakan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dalam jangka panjang hasil pembelajaran yang terpenting adalah diperolehnya peningkatan kemampuan belajar secara lebih mudah dan lebih efektif di masa depan sebagai akibat telah dikuasainya pengetahuan dan keterampilan dari proses pembelajaran yang telah dilalui.

Hakekat mutu pendidikan terdiri dari 14 hal, antara lain:

- (1) Menciptakan konsistensi tujuan yaitu memperbaiki layanan dan siswa, yaitu dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia;
- (2) Mengadopsi filosofi mutu total, yaitu sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk berkompetisi dalam sebuah perekonomian global. Setiap anggota system sekolah harus belajar keterampilan baru untuk mendukung revolusi mutu. Orang mesti menerima tantangan mutu;

- (3) Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu;
- (4) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru yaitu dengan meminimalkan biaya total pendidikan;
- (5) Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya;
- (6) Belajar sepanjang hayat;
- (7) Kepemimpinan dalam pendidikan;
- (8) Mengeliminir rasa takut;
- (9) Mengeliminir hambatan keberhasilan;
- (10).Menciptakan budaya mutu;
- (11).Perbaikan proses bahwa proses tidak ada yang sempurna sehingga mencari proses yang terbaik;
- (12).Membantu siswa berhasil;
- (13).Komitmen terhadap mutu; dan
- (14).Tanggung jawab setiap orang dalam menyelesaikan transformasi mutu.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pembelajaran akan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas lulusan. Kualitas lulusan adalah merupakan hasil sebuah proses pendidikan yang tentunya akan menjadi ukuran terhadap mutu pendidikan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut PP 19 Tahun 2005 Tentang SNP adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang SMP meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi, dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Laboran, dan Tenaga Kebersihan.

Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan oleh Sekolah Standar Nasional (SSN) mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain :

- a. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalitas;
- b. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek pedagogik;
- c. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek sosial;
- d. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek kepribadian;
- e. Pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU;
- f. Pengembangan atau peningkatan kompetensi kepala sekolah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap kinerja pendidik dan tenaga TU;
- h. Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Depdiknas, 2008 : 46).

6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya; sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guuru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran; dengan demikian sarana dan prasarana

merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2006: 53).

Sekolah yang bermutu ditandai dengan pelaksanaan proses proses pembelajaran yang bermutu. Sedangkan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu. Pelaksanaan pengembangan sekolah standar nasional harus memiliki beberapa sarana penunjang pembelajaran antara lain perpustakaan dan ruang baca yang memadai. Sebagai sekolah standar nasional juga harus memiliki ruang laboratorium komputer, IPA, dan Bahasa. Selain itu sekolah juga harus memiliki antara lain ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang BP, ruang OSIS, ruang Pramuka, ruang keterampilan, ruang UKS, ruang ganti pakaian, tempat ibadah, kantin, dan kamar kecil yang memadai.

Selain penunjang pembelajaran sekolah juga harus memiliki sarana infrastruktur lainnya yaitu listrik yang cukup, air bersih, telepon, jaringan internet, dan lain-lain sehingga terciptanya kenyamanan dalam proses pembelajaran bagi warga sekolah utamanya siswa yang melakukan aktivitas belajar.

Pada sekolah standar nasional (SSN) pengembangan sarana prasarana harus dikembangkan, hal itu untuk memenuhi kebutuhan sarpras yang sesuai dengan standar sarana prasarana.

Lahan satuan pendidikan meliputi sekurang-kurangnya lahan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara

ekologis nyaman dan sehat. Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik, yaitu untuk SMP rasio luas ruang kelas per peserta didik adalah satu peserta didik sekurang-kurangnya membutuhkan 1,6 m².

Standar kualitas bangunan minimal pada SMP adalah kelas B. Standar keragaman buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah minimal judul buku di perpustakaan satuan pendidikan., dengan standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan per peserta didik. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium IPA, bahasa, komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia, yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik akan diatur oleh BSNP (Depdiknas, 2005:3).

7. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sitem informasi. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada

commit to user

struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis di bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan.

Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SMP menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan KTSP, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Pada satuan pendidikan SMP kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Keputusan akademik pada satuan pendidikan ditetapkan oleh rapat dewan pendidik. Rapat dewan pendidik dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada mutu, dan apabila keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak. Pada jenjang pendidikan SMP melibatkan Komite Sekolah. Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota masyarakat yang mewakili orang tua/ wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya mengatur tentang :

- a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Silabus.

commit to user

- b. Kalender kegiatan pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semester, bulan, dan mingguan.
- c. Struktur organisasi satuan pendidikan.
- d. Pemeliharaan sarana prasarana.
- e. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.
- f. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Biaya operasional satuan pendidikan. (Depdiknas, 2005 : 5).

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pemimpin satuan pendidikan dan komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemantauan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik.

Beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan pada standar pengelolaan pendidikan bagi sekolah standar nasional (SSN) antara lain :

- a. Pengembangan/ pembuatan rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang;

commit to user

- b. Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat pembagian tugas secara jelas;
- c. Pengembangan struktur dan keorganisasian sekolah sesuai kebutuhan sekolah;
- d. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien;
- e. Mendukung pengembangan perangkat penilaian;
- f. Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah;
- g. Implementasi MBS mengenai kemandirian/ otonomi sekolah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi/ kerjasama, fleksibilitas, dan kontinuitas baik mengenai program, keuangan, hasil-hasil program serta lainnya oleh pihak manajemen sekolah.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sekolah tentang kinerja sekolah;
- i. Pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala sekolah;
- j. Penggalangan partisipasi masyarakat/ pemberdayaan komite sekolah;
- k. Membuat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah;
- l. Membuat/ menciptakan jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal dan horisontal;
- m. Implementasi model-model manajemen untuk pengembangan standar-standar pendidikan;
- n. Mengembangkan unit-unit produksi/ usaha di sekolah; dan
- o. Melaksanakan dan membuat pelaporan-pelaporan kepada berbagai pihak yang relevan. (Depdiknas, 2008 : 51).

8. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan suberdaya yang ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Depdiknas, 2005:7).

Pengembangan sekolah standar nasional (SSN) membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia memang belum memenuhi standar nasional (SNP), untuk itu semua komponen sekolah harus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Segala upaya tersebut selalu berakhir pada kebutuhan biaya atau dana. SMP SSN harus memiliki sumber dana yang cukup baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, komite sekolah, sponsor, serta sumber dana dari sekolah sendiri.

Adapun dari berbagai sumber pengembangan pembiayaan tersebut diharapkan dapat :

- a. Tersusunnya program-program dalam upaya pengembangan pembiayaan sekolah standar nasional.
- b. Diperolehnya sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan berstandar nasional.
- c. Terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

Pembiayaan sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan, atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal dari orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan donator lain. Penggunaan dana harus dipertanggung jawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Adapun aspek dan indikatornya adalah :

a. Jenis dan Sumber pembiayaan

- (1) Sekolah menyusun rancangan biaya operasional program kerja tahunan.
- (2) Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi (penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap); biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan); bahan atau peralatan habis pakai; biaya operasi pendidikan tak langsung; dan biaya personal (biaya pendidikan dari peserta didik).
- (3) Sekolah mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri.

b. Program pembiayaan

- (1) Adanya program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan donator lainnya) melalui program yang rasional dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan.
- (2) Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu standar pendidikan (Depdiknas, 2008 : 53).

9. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemampuan, dan kemajuan hasil belajar. Penilaian digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; memperbaiki proses pembelajaran; dan menentukan kelulusan peserta didik.

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian itu mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Adapun aspek dan indikatornya adalah :

a. Perangkat penilaian

- (1) Menyusun perangkat penilaian berupa kisi-kisi, soal/ bank soal, lembar jawaban, kunci jawaban, pedoman penilaian, format penilaian, dan laporan hasil penilaian.
- (2) Menyusun rencangan jadwal pelaksanaan penilaian, remidiasi, dan pengayaan.
- (3) Menganalisis hasil belajar peserta didik.

(4) Memiliki dokumen laporan hasil belajar peserta didik.

b. Pelaksanaan penilaian

(1) Penilaian dilakukan sepanjang semester

(2) Teknik penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, dapat berupa tes tertulis, observasi, praktik, dan penugasan perorangan atau kelompok.

(3) Mata pelajaran selain selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.

(4) Adanya upaya/ program kerja sama dengan lembaga pendidikan lain, untuk penerbitan sertifikat kelulusan pada mata pelajaran/ program pembelajaran tertentu yang kelulusannya dilakukan melalui uji kompetensi.

(5) Seluruh pendidik telah melakukan penilaian hasil belajar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

c. Hasil penilaian

(1) Peserta didik hasil belajarnya minimal mencapai batas KKM.

(2) Rerata nilai Ujian Nasional tiga tahun terakhir minimal 7.00

(3) Persentase kelulusan Ujian Nasional ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir.

Sebagai sekolah standar nasional (SSN), maka dalam pelaksanaannya pada standar penilaian target yang harus dicapai meliputi : terdapatnya perangkat penilaian berbagai ragam untuk semua mapel dan semua jenjang kelas; terselenggaranya berbagai model evaluasi; terdapatnya dokumen pengembangan bank soal; dan terdapatnya berbagai macam lomba dan uji coba untuk peningkatan prestasi peserta didik (Depdiknas, 2008 : 56).

Pelaksanaan Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP memerlukan kesiapan dari seluruh warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk dukungan. Selain dukungan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari pihak luar sekolah. Dukungan pihak luar sekolah tersebut sangat diperlukan karena SSN merupakan upaya peningkatan mutu sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang memerlukan kerjasama dengan pihak luar sekolah.

B. Penelitian yang Relevan

Pujinta (2008) dalam penelitian mengenai “Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tingkat Sekolah Dasar” (Studi Kasus di SD Tarakanita Grogol Sukoharjo). Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan implementasi KBK;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KBK.

Hasil penelitian ditemukan bahwa :

1. Ditinjau dari komponen kondisi fisik lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan; terdapatnya

commit to user

peningkatan perhatian dan partisipasi warga serta masyarakat sekitar sekolah dalam pelaksanaan KBK yang dicapai melalui pengambilan keputusan.

2. Komponen Perencanaan : adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penggunaan sumberdaya sekolah, seperti program sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, transparan, dan demokratis, merupakan serangkaian pengaruh yang sangat positif dalam pelaksanaan KBK.

3. Komponen Pelaksanaan : terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, yang lebih menekankan pada belajar mengetahui (*learning to know*), belajar bekerja (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar hidup bersama secara harmonis (*learning to live together*).

Sedangkan penelitian tentang Penyelenggaraan Kelas Unggulan di SMP Negeri 5 Kota Sragen yang dilakukan oleh Djoko Sambodo (2007) mendapatkan hasil penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan kelas unggulan di SMPN 5 Kota Sragen ditinjau dari; rekrutmen input peserta didik, rekrutmen guru, kurikulum yang digunakan, media pembelajaran dan sumber belajar, proses kegiatan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai teori-teori yang ada sehingga pelaksanaan penyelenggaraan kelas unggulan dapat berjalan dengan baik;

2. Persepsi guru, siswa, dan orang tua murid terhadap kelas unggulan sangat positif;

3. Kendala yang ditemukan adalah kurangnya sarana pendukung di awal pelaksanaan dapat diatasi dengan kemampuan manajemen yang baik oleh pihak sekolah; dan

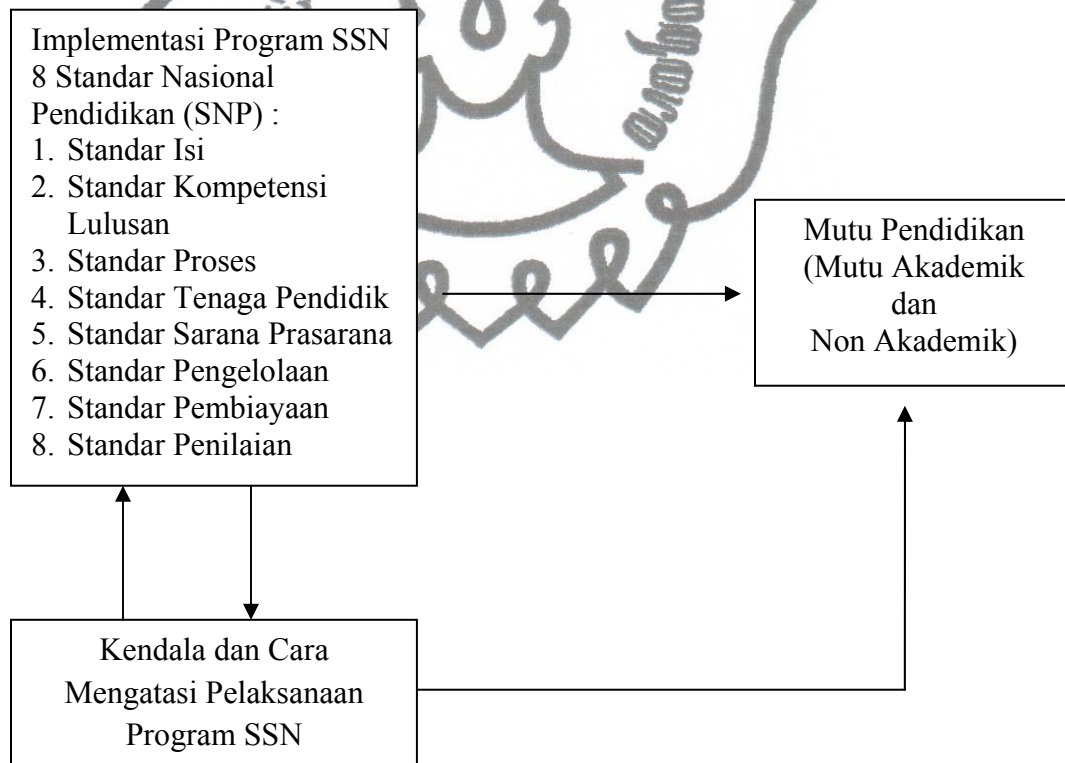
commit to user

4. Pelaksanaan kelas unggulan berdampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan ini merupakan kelanjutan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Bagan 2
Proses Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menggambarkan urutan dalam Implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN). Kegiatan dimulai dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk menjangkau peserta didik berdasarkan nilai UASBN SD sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil *in put* kemudian diproses dalam sekolah yang mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai sekolah standar nasional (SSN). Pada saat mengimplementasikan program sekolah standar nasional (SSN) tentu mengalami berbagai kendala, namun kendala tersebut dicarikan upaya untuk mengatasinya. Setelah proses selesai maka menghasilkan peserta didik sebagai *out put* yang bermutu, baik mutu akademik maupun mutu non akademik yang sekaligus merupakan peningkatan mutu pendidikan.

Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi : standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Apabila semua komponen di atas saling mendukung di dalam mengimplementasikan program sekolah standar nasional (SSN) di sekolah, maka akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data tentang penyelenggaraan sekolah standar nasional (SSN) maka peneliti memilih dan melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri, yang beralamat di Pandeyan, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. SMP Negeri 2 Jatisrono telah melaksanakan program sekolah standar nasional (SSN) untuk tahun yang ketiga, atas dasar pertimbangan dari segi prestasi yang telah dicapai adalah: *pertama*, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah selama dua tahun berturut-turut mendapatkan penilaian sangat memuaskan; *kedua*, hasil penilaian Akreditasi Sekolah mencapai nilai A dengan skor 89.56; *ketiga*, hasil Ujian Nasional (UN) pada tahun pelajaran 2009/2010 menduduki peringkat 14 tingkat Kabupaten Wonogiri dari jumlah sekolah negeri 75; *keempat*, secara letak geografis memudahkan peneliti untuk mengadakan penelitian karena peneliti bertempat tinggal tidak jauh dari SMP Negeri 2 Jatisrono dan mengenal lokasi penelitian secara keseluruhan.

Hasil penelitian diharapkan benar-benar akan memberi manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono dalam
commit to user

mengimplementasikan program SSN sehingga benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian sebagai proses pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengecekan data. Sedangkan perencanaan waktu penelitian dan penulisan laporan memerlukan waktu satu semester (6 bulan).

Adapun jadwal penelitian dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Juli 2010	Agust. 2010	Sept. 2010	Okt. 2010	Nov. 2010	Des. 2010
1.	Perizinan dan Persiapan Penelitian	v	v				
2.	Konsultasi Bab I, II, dan III		v	v	v		
3.	Pengumpulan Data, Analisis Data, Penulisan Laporan Bab IV, V dan Konsultasi			v	v	v	
4.	Revisi					v	v
5	Ujian Tesis						v
6	Revisi						v

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuknya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realita persoalan dengan berlandaskan pada pengumpulan data yang diungkap oleh para informan dan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dengan realitas yang sebenarnya. Moleong (1993:3) menyatakan bahwa “Metode deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dapat diamati”.

Jenis penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi tentang implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono yang terdiri dari : pelaksanaan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam program sekolah standar nasional (SSN), kendala dan cara mengatasi pelaksanaan program SSN, dan dampak positif program SSN dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (Lofland dalam Lexy Moleong, 2004:186).

Dalam penelitian ini sumber data digali dari tiga sumber yaitu:

1. Peristiwa, yaitu proses belajar mengajar, proses di laboratorium, kegiatan di perpustakaan maupun kegiatan lain yang mendukung data dalam penelitian di SMP Negeri 2 Jatisrono.
2. Informan. Sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan yang diambil dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai (informan). Informan yang dimaksud adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, penanggung jawab program SSN, guru, kepala TU, siswa, orang tua siswa, komite sekolah serta informan lain yang dipandang mengetahui dari pokok penelitian yang di SMP Negeri 2 Jatisrono. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di dalam ruang kelas pada saat proses belajar mengajar, laboratorium, perpustakaan dan kegiatan lain di lingkungan SMP Negeri 2 Jatisrono.
3. Dokumen atau sumber tertulis. Sumber data pendukung atau tertulis (dokumen) ini terdiri dari sumber-sumber tertulis yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan program SSN berupa 8 standar nasional pendidikan

(SNP) dan hal-hal yang mendukung lainnya seperti; laporan penilaian perkembangan siswa, catatan guru, laporan hasil studi siswa, catatan guru BK, RPP, rencana harian, kurikulum, hasil-hasil pekerjaan/prestasi siswa, buku-buku kegiatan siswa, foto-foto kegiatan, dan dokumen lain yang ditentukan kemudian untuk mendukung data penelitian di SMP Negeri 2 Jatisrono.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu : pengamatan berpartisipasi (*participation observation*), wawancara mendalam (*deep interview*), dan analisis dokumen (Nasution, 1996:54).

Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut :

1. Pengamatan. Dalam penelitian ini pengamat berpartisipasi pada saat subjek penelitian sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lain di sekolah.
2. Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala TU, kepala perpustakaan, penanggung jawab program SSN, guru senior, siswa, dan orang tua. Wawancara mendalam adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi atau data dengan cara langsung bertanya kepada responden. Masri Singarimbun (1989 : 192) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung berhadapan atau melalui media.

3. Analisis Dokumen. Analisis dokumen adalah analisis dokumen yang ada di lapangan yang mendukung terhadap fokus penelitian. Analisis dokumen ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena merupakan sumber yang stabil, misalnya administrasi sekolah, administrasi guru, administrasi TU, hasil prestasi siswa, dan foto-foto kegiatan yang mendukung data penelitian.

E. Teknik Sampling (Cuplikan)

Sampling dalam penelitian ini bersifat *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang meyakinkan. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif bermaksud menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (Lexy Moleong, 2004:165).

Adapun sumber data atau *key informan* yang dipilih oleh peneliti adalah : kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan, penanggung jawab program SSN, komite sekolah, guru BK, guru, dan ketua OSIS.

F. Validitas Data

Agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka validitas data sangat diperlukan. H.B. Sutopo (2000 :52) mengemukakan, 'validitas merupakan jaminan bagi kemampuan kesimpulan dan tafsir makna penelitiannya'. Penelitian ini menggunakan triangulasi dan review informan untuk menjamin validitas data.

commit to user

1. Triangulasi

Pengujian validitas data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu peneliti agar dapat mengumpulkan data dengan menggunakan beragam sumber data yang berbeda, yaitu informan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, penanggung jawab program SSN, kepala TU, guru, guru BK, kepala perpustakaan, komite sekolah, dan ketua OSIS.

2. Reviu Informan

Reviu informan merupakan suatu pengembangan validitas yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pada penyusunan laporan, walaupun belum utuh perlu dikomunikasikan dengan informannya, khususnya yang dipandang sebagai *key person*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang telah disusun merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif yang prosesnya dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, hasil catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan temuan lain di lapangan. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi.

Adapun langkah-langkah proses analisis data dengan metode interaktif sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

commit to user

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama data yang diperlukan belum memadai dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai dalam pengambilan keputusan. Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut berisi apa yang dikemukakan oleh informan dan juga catatan tentang tafsiran peneliti terhadap informasi yang diberikan oleh responden.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang dan dikurangi. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang direduksi akan member gambaran yang lebih tajam tentang objek pengamatan yang telah dilakukan dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Sebagai proses analisis data selanjutnya, inti dari penyajian data ini adalah mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun penggambaran proses dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Data yang sudah direduksi

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau gambar dan tulisan yang sudah disusun secara sistematis. Dengan demikian data tersebut mudah dikuasi dan memudahkan pula dalam pengambilan kesimpulan.

4. Menarik Kesimpulan

Merupakan analisis rangkaian pengolahan data yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penyusunan catatan, pola dan arahan sebab akibat dilakukan secara teratur. Artinya kesimpulan akhir yang ditulis merupakan rangkaian keadaan dari yang belum jelas kemudian meningkat sampai pada pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis terhadap fenomena yang ada.

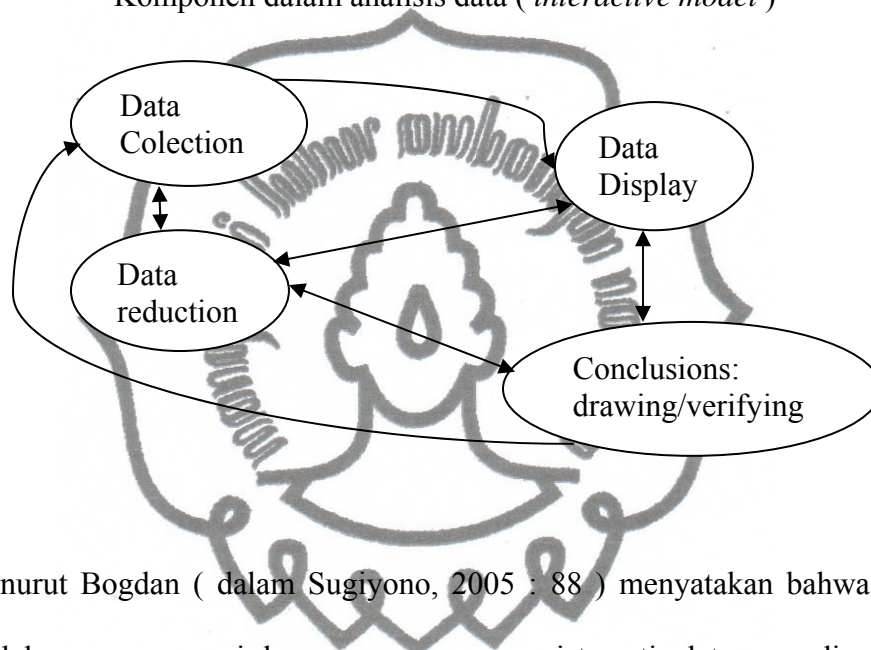
Penarikan kesimpulan sudah dilakukan sejak awal penelitian berlangsung. Setiap perolehan data dianalisis dan disimpulkan walaupun masih agak kabur, tetapi lama-kelamaan akan semakin jelas dengan semakin banyaknya data yang diperoleh dan mendukung verifikasi. Demikian seterusnya sehingga membentuk sebuah siklus analisis interaktif.

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Analisis Interaktif. Analisis Data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

commit to user

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2005 : 91).

Gambar. 1
Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2005 : 88) menyatakan bahwa, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan membahas Deskripsi tentang SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri, Temuan Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian. Adapun pembahasan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. Deskripsi SMP Negeri 2 Jatisrono

Letak geografis SMP Negeri 2 Jatisrono berada di jalan raya Pandeyan – Jatisrono – Wonogiri, tepatnya terletak di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, NSS 201031220103, Telepon (0273) 411533, Kode Pos 57691. Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) menetapkan bahwa SMP Negeri 2 Jatisrono memperoleh akreditasi dengan peringkat A (Amat Baik) dengan nilai 89,56 yang berlaku sampai dengan tahun ajaran 2013/2014.

Lokasi SMP Negeri 2 Jatisrono terletak di tepi jalan raya Wonogiri – Jatisrono sehingga sangat strategis dan mudah dijangkau baik menggunakan angkutan umum berupa bus maupun kendaraan pribadi. Dari kota Wonogiri ke arah Jatisrono kurang lebih 27 kilo meter. SMP Negeri 2 Jatisrono terletak di tengah-tengah dengan SMP Negeri yang lain. Sebelah timur kurang lebih 3 km adalah SMP Negeri 1 Jatisrono. Sedangkan sebelah utara kurang lebih 3 km adalah SMP Negeri 2 Jatipurno. Sebelah barat kurang lebih 3 km adalah SMP Negeri 1 Sidoharjo dan kurang lebih 6 kilometer terdapat SMP Negeri 1 Jatiroto. SMP Negeri 2 Jatisrono menempati tanah seluas

19.500 m² dengan rincian luas bangunan seluas 3118 m² yang sebagian besar tanahnya rata namun pada bagian barat berupa tanah yang miring sehingga beberapa bangunan gedung sekolah terletak di bawah dari bangunan yang lain.



SMP Negeri 2 Jatisrono merupakan unit gedung baru (UGB) yang dibangun oleh pemerintah dan diresmikan pada tanggal 18 Februari 1986 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0594/O/1985 dan merupakan SMP Negeri yang ke 2 untuk wilayah Kecamatan Jatisrono. Pada saat ini di Kecamatan Jatisrono terdapat 4 buah SMP Negeri dan 2 buah SMP Swasta.

Sejak berdiri, SMP Negeri 2 Jatisrono telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Sekolah. Adapun kepala sekolah tersebut adalah :

1. Mufith Atmo Hatmodjo (01-6-1985 s.d. 19-6-1987)
2. Soeratmi Sadhono (19-6-1987 s.d. 28-3-1990)
3. Sri Murti (29-3-1990 s.d. 20-4-1994)
4. Siti Dawimah (01-5-1994 s.d. 28-7-2000)
5. Drs. Soekadi Adi Winoto (29-7-2000 s.d. 30-5-2003)

6. Drs. Ngadimin (31-5-2003 s.d. 31-5-2004)
7. S. Karsanto, B.A (01-6-2004 s.d. 16-3-2006)
8. Drs. Wasis Sutrisno (17-3-2006 s.d. 29-12-2007)
9. Dra. Ninuk Dwi Sutartini (27-12-2007 s.d. sekarang)

Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008 setelah melalui tahapan berdasarkan mekanisme penilaian dan verifikasi sebagai bagian dari proses seleksi oleh Direktorat Pembinaan SMP. SMP Negeri 2 Jatisrono telah lolos seleksi tahap I, II, dan III berupa verifikasi berkas dan penilaian terhadap Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) serta Profil Sekolah yang telah disusun. Rangkaian tahap akhir dari penetapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan seleksi tahap III, Direktorat Pembinaan SMP menetapkan sekolah yang terpilih sebagai rintisan SSN, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
2. Sekolah yang ditetapkan sebagai rintisan SSN menerima bantuan dana *block grant*. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMP mengirimkan berkas kontrak antara sekolah dengan Direktorat Pembinaan SMP, yang berisi perjanjian kerja sebagai rintisan sekolah standar nasional. Kontrak perjanjian tersebut merupakan perjanjian bantuan kepada sekolah dan kesepakatan pemenuhan syarat, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan program-program inovatif yang telah dirumuskan pada RPS.

3. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang dikirim oleh sekolah menjadi bagian kontrak , artinya dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP akan digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RPS yang diajukan.
4. Setelah kontrak ditandatangani oleh Kepala Sekolah , dana *block grant* SSN akan dikirim ke sekolah melalui Bank terdekat yang ditunjuk oleh sekolah dengan nomor rekening sekolah dan bukan nomor rekening pribadi kepala sekolah. Apabila dana bantuan telah diterima, sekolah harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada Direktorat Pembinaan SMP sebagai upaya cek silang.
5. Sekolah harus melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dengan melibatkan semua komponen sekolah (warga sekolah) dan dilakukan dengan sungguh-sungguh serta penuh rasa tanggung jawab.

Pelaksanaan program sekolah standar nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono dengan Surat Keterangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1375/C3/DS/2008 Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP menyatakan bahwa SMPN 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah memperoleh nilai 346.00. Nilai tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut sebagai Sekolah Formal Mandiri/ Sekolah Standar Nasional (SSN). Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4520/C.C3/MN/2009 Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan

tahun 2009 Direktorat Pembinaan SMP menyatakan bahwa SMPN 2 Jatisrono memperoleh nilai 356,58. Nilai tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan Program SSN di SMP Negeri 2 Jatisrono dapat dipahami dari penjelasan hasil wawancara catatan lapangan nomor 1a (CL.No.1a), yang disampaikan oleh Kepala Sekolah sekaligus Penanggung Jawab Program SSN di SMP Negeri 2 Jatisrono. Ibu Dra. Ninuk Dwi Sutartini memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Program Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Perlu saya perjelas yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar. Sekolah standar nasional disamping harus memenuhi standar nasional pendidikan seperti diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2005, juga harus memiliki standarisasi dari kedelapan aspek tersebut secara nasional. Dengan demikian apabila sudah ditetapkan sebagai SSN diharapkan keberadaan SSN di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama” (CL. No.01).

Saat penelitian ini dilaksanakan, implementasi program SSN di SMP Negeri 2 Jatisrono memiliki Tim Penanggung jawab Program, yang selanjutnya akan menjalankan tugas melaksanakan program SSN sesuai dengan panduan pelaksanaan

pembinaan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Berikut ini adalah Susunan Tim Penanggung jawab Program dokumen catatan lapangan nomor 1b (CL. No. 1b).

Penanggung Jawab Pelaksanaan SSN	: Dra. Ninuk Dwi Sutartini (Kepala Sekolah)
Penanggung Jawab Program SSN	: Partanto, S. Pd
Sekretaris	: Sri Hartono, S. Pd, Giyadi, S.Pd
Bendahara	: Sugiarto, S.E, Isdwi Astuti, S.Pd
Penanggung Jawab Sasaran	:
Standar Kompetensi Lulusan	: S. Marsono, S. Pd
Standar Isi	: Sri Hartono, S. Pd
Standar Proses	: Dra. Supadmini
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	: Giyadi, S. Pd
Standar Sarana Prasarana	: Tiyono, S. Pd
Standar Pengelolaan	: Santo, S. Pd
Standar Keuangan	: Susilowati, S. Pd
Standar Penilaian	: Dra. Sri Sumarni

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai pengembangan sekolah standar nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono adalah produk-produk hukum berdasarkan dokumen catatan lapangan nomor 1c (CL No. 1c) meliputi :

Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; dan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

a. Standar Isi Pendidikan

Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan dengan kebutuhan dan potensi di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) untuk menjamin pencapaian

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan sistem paket dengan beban belajar melalui sistem tatap muka sebanyak 42 jam pelajaran per minggu, berdasarkan hasil wawancara catatan lapangan nomor 3a dengan Urusan Kurikulum Giyadi, S.Pd (CL. 3a) mempunyai alasan bahwa :

“Kurikulum yang dipergunakan adalah KTSP menggunakan sistem paket. Secara umum motivasi untuk belajar siswa masih kurang, dengan asumsi bahwa siswa benar-benar belajar hanya di sekolah sedangkan untuk belajar di rumah masih tergantung pengawasan dan peran aktif orang tua. Selain itu sekolah berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki sehingga dapat dicapai peningkatan GSA sekolah”.

Adapun Muatan Lokal (Mulok) yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 3c (CL. 3c) adalah :

- (1). Bahasa Jawa, berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.50/01/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa.
- (2). Elektronika, dengan alasan sumber daya guru dan sarana prasarana dimiliki oleh sekolah. Selain itu dengan pertimbangan memberikan bekal untuk berwira usaha dan memberikan pengetahuan dasar tentang elektronika dalam melaksanakan kebutuhan hidup di lingkungan rumah tangga dan masyarakat.

Struktur Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 3d (CL. 3d) dibagi menjadi dua, yaitu :

Tabel 2

Struktur Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono

Komponen	Kelas dan Alokasi		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan / Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2

B. Muatan Lokal			
1. Bahasa Jawa	2	2	2
2. Elektronika	2	2	2
C. Pengembangan Diri *)	2 *)	2*)	2*)
1. Pelayanan Konseling			
2. Kepramukaan			
3. PMR			
4. Olah Raga Permainan			
5. Seni Tari			
6. Seni Bela Diri			

7. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)			
8. Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)			
9. Bahasa Inggris			
Jumlah	36	36	36

2 *) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Pengembangan Struktur Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono **)

MATA PELAJARAN		KELAS DAN ALOKASI		
		VII	VIII	IX
1	Bahasa Inggris	2	2	2
2	Matematika	2	2	2
3	Ilmu Pengetahuan Alam	1	1	1
4	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	1	1
	JUMLAH	6	6	6

Tabel 3

Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka

Kelas	Satu jam Pembelajaran tatap muka/menit	Jumlah jam pembelajaran per minggu	Minggu efektif pertahun	Waktu pembelajaran/ jam per tahun
VII	40	42	34 - 38	1088 - 1216
VIII	40	42	34 - 38	1088 - 1216
IX	40	42	34 - 38	1088 - 1216

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Proses penyusunan dokumen KTSP berdasarkan hasil wawancara dengan Giyadi, S. Pd selaku Urusan Kurikulum (CL. No. 3b) sebagai berikut :

“Membentuk Tim Penyusun KTSP (Kasek, Guru, Konselor) disertai uraian tugas masing-masing unsur yang terlibat. Menyusun program dan jadwal kerja Tim Penyusun KTSP yang mencakup: penyusunan draf, reviu, revisi, finalisasi,

commit to user

pemantapan, penilaian keterlaksanaan KTSP, dan tindak lanjut hasil penilaian secara komprehensif dan tersistem. Menganalisis konteks dan menyusun hasil analisis berupa: (1) Identifikasi SI, SKL, SK, dan KD sebagai acuan dalam menjabarkan menjadi Indikator, Materi Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Bahan Penilaian, dan Bahan/ Media/ Alat Pembelajaran. (2) Analisis kondisi satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, biaya, dan program-program)”

Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono tersebut memuat: tujuan pendidikan dasar, visi, misi, dan tujuan sekolah berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 2b (CL. 2b). Adapun penjabaran selengkapnya adalah :

(1) Tujuan Pendidikan Dasar

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(2) Visi Sekolah

Wiyata Adi Luhur Budi Pekerti

(3) Misi Sekolah

Untuk mencapai Visi tersebut sekolah menetapkan indikator sebagai berikut :

- (a) Terwujudnya pendidikan yang adil dan merata.
- (b) Terwujudnya pendidikan yang bermutu, efisien, dan bermutu.
- (c) Terwujudnya sistem transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif.
- (d) Terwujudnya pengembangan kurikulum.
- (e) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (f) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- (g) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul.

- (h) Terwujudnya prestasi akademis dan non akademis yang tangguh.
- (i) Terwujudnya peningkatan standar ketuntasan belajar.
- (j) Terwujudnya penataan dan pengembangan lingkungan sekolah yang kondusif.
- (k) Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sekolah yang tangguh.
- (l) Terwujudnya imtaq kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi.

(4) Tujuan Sekolah

Adapun secara operasional tujuan yang akan dicapai oleh SMP Negeri 2 Jatisrono pada tahun pelajaran 2010/ 2011, meliputi :

- (a) Memenuhi akan pemerataan dan keadilan pendidikan yang lebih baik.
- (b) Sekolah mengembangkan pembelajaran remedial.
- (c) Memenuhi akan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif.
- (d) Memenuhi akan pengembangan perangkat pembelajaran.
- (e) Sekolah mengembangkan pendekatan CTL dan berbagai model pembelajaran
- (f) Sekolah meningkatkan GSA + 0,10 setiap tahunnya dan mempertahankan peringkat sekolah.
- (g) Sekolah mengembangkan potensi non akademik siswa (KIR, Pramuka, PMR, Elektronika, Penjas Orkes, Komputer, dan Seni Tari).
- (h) Sekolah mengembangkan media dan sarana prasarana pembelajaran.

- (i) Sekolah mengembangkan kompetensi dan profesionalitas guru untuk semua mata pelajaran.
- (j) Mencapai standar ketuntasan belajar untuk semua mata pelajaran.
- (k) Sekolah melaksanakan supervisi pendidikan.
- (l) Sekolah mengembangkan manajemen sekolah.
- (m) Sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (n) Sekolah mengembangkan sistem informasi manajemen.
- (o) Sekolah mengembangkan jalinan kerja sama dengan penyandang dana dari berbagai sumber.
- (p) Sekolah mengembangkan aktivitas keagamaan yang tercermin dari perilaku siswa.

Proses penyusunan dan merumuskan Visi dan Misi di SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan hasil wawan cara dengan Sri Hartono, S. Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah (CL No.2a) sebagai berikut :

“Proses penyusunan dan merumuskan visi dan misi di SMP Negeri 2 Jatisrono adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, unsur guru, unsur komite sekolah, dan tokoh masyarakat dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri”.

Struktur dan muatan Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono seperti yang tertuang dalam Standar Isi (SI), meliputi lima kelompok mata pelajaran berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 2c (CL. 2c). Adapun pengelompokan mata pelajaran selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia meliputi Pendidikan Agama

- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi Pendidikan Kewarganegaraan
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Elektronika
- (4) Kelompok mata pelajaran estetika meliputi Seni Budaya dan Bahasa Jawa
- (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan meliputi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Penyusunan dan pengembangan silabus Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan wawancara dengan Giyadi, S. Pd selaku Urusan Kurikulum (CL No.4a) sebagai berikut :

“Adapun tahap penyusunan dan pengembangan silabus :

- (1) Disusun dan dikembangkan secara mandiri dengan melibatkan semua guru melalui kegiatan *workshop* di sekolah.
- (2) Silabus disusun dan dikembangkan melalui proses penjabaran SK/ KD menjadi Indikator, Materi Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Jenis Penilaian.
- (3) Mencakup semua mata pelajaran baik yang SK/ KDnya telah ditentukan oleh Depdiknas maupun yang disusun oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (4) Memanfaatkan berbagai panduan dan contoh silabus yang dikembangkan oleh Depdiknas sebagai referensi dalam penyusunan dan pengembangan silabus di sekolah.”

b. Standar Kompetensi Lulusan

Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini melaksanakan sistem belajar tuntas dengan ketentuan batas tuntas ditentukan oleh sekolah sendiri dengan nama Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Di bawah ini adalah tabel kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisrono Nomor 800/ 201.B yang berlaku di SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 4b (CL. 4b), sebagai berikut :

Tabel 4

REKAPITULASI KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
SMP NEGERI 2 JATISRONO
TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

KOMPONEN	KKM			KETERANGAN
	VII	VIII	IX	
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	73	73	73	
2. Pendidikan Kewarganegaraan	72	72	72	
3. Bahasa Indonesia	70	70	70	
4. Bahasa Inggris	64	65	66	
5. Matematika	64	64	64	
6. Ilmu Pengetahuan Alam	64	65	65	
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	71	71	71	
8. Seni Budaya	73	73	73	
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	72	73	73	
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	70	70	70	
B. Muatan Lokal				
1. Bahasa Jawa	72	72	72	
2. Elektronika	70	70	70	
C. Pengembangan Diri	Minimal Baik			

Berdasarkan tabel KKM tersebut dapat dideskripsikan bahwa Mata pelajaran Pendidikan Agama kelas VII, VIII, dan IX kriteria ketuntasan minimal (KKM) nya adalah 73, artinya seorang peserta didik untuk mata pelajaran Pendidikan Agama paling sedikit harus mencapai nilai 73. Apabila seorang peserta didik mencapai nilai kurang dari 73 berarti peserta didik tersebut belum tuntas untuk mata pelajaran Pendidikan Agama. Sedangkan apabila seorang peserta didik mendapat nilai lebih dari 73, peserta didik tersebut dinyatakan terlampaui untuk mata pelajaran Pendidikan Agama.

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Adapun kriteria kenaikan kelas bagi peserta didik di SMP Negeri 2 Jatisrono diatur berdasarkan wawancara dengan Giyadi, S.Pd selaku Urusan Kurikulum (CL. No.5a) sebagai berikut:

- (1) Siswa dinyatakan naik kelas apabila semua mata pelajaran \geq KKM masing-masing mata pelajaran.
- (2) Siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 95% dari jumlah hari masuk efektif, yang diperhitungkan tidak hadir tanpa keterangan.
- (3) Siswa dinyatakan naik kelas apabila nilai kepribadian sekurang-kurangnya Baik (B), yang berasal dari penilaian seluruh mata pelajaran.
- (4) Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran dan atau memiliki nilai \leq 50.
- (5) Siswa dinyatakan naik kelas apabila mengikuti seluruh aspek penilaian.

Sedangkan untuk menentukan peserta didik lulus atau tidak lulus menggunakan kriteria kelulusan berdasarkan PP 19/ 2005 Pasal 72 Ayat 1 berdasarkan dokumen KTSP catatan lapangan nomor 5b (CL. 5b) yang berbunyi, peserta didik dinyatakan lulus apabila :

Alamat : Pandeyan-Jatisrono
 Nama Peserta Didik : Adi Ardiansyah
 Nomor Induk : 5606

Semester : Dua
 Tahun Ajaran : 2009/2010

No	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama	72	77	Tujuh puluh tujuh	Terlampai
2	Pendidikan Kewarganegaraan	72	73	Tujuh puluh tiga	Terlampai
3	Bahasa Indonesia	69	75	Tujuh puluh lima	Terlampai
4	Bahasa Inggris	63	66	Enam puluh enam	Terlampai
5	Matematika	63	72	Tujuh puluh dua	Terlampai
6	Ilmu Pengetahuan Alam	63	72	Tujuh puluh dua	Terlampai
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	70	72	Tujuh puluh dua	Terlampai
8	Seni Budaya	72	75	Tujuh puluh lima	Terlampai
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	72	75	Tujuh puluh lima	Terlampai
10	Pilihan : **) a. Keterampilan	-			
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi	68	74	Tujuh puluh empat	Terlampai
11	Mulok : **) a. Bahasa Jawa	72	74	Tujuh puluh empat	Terlampai
	b. Elektronika	66	75	Tujuh puluh lima	Terlampai

Kegiatan Pengembangan Diri

Jenis Pengembangan Diri	Nilai	Keterangan
1. Pramuka	B	

Keputusan : naik ke kelas VIII (Delapan).../ tinggal di kelas ...

Sedangkan satu siswa yang tidak naik kelas pada tahun pelajaran 2009/2010 bernama Burhan dan pada tahun pelajaran 2010/ 2011 masih mengulang di kelas VII. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Widiyani, S.Pd sebagai guru BK pada catatan lapangan No. 5d (CL. 5d) menyatakan bahwa :

“Burhan adalah satu-satunya siswa yang tidak naik ke kelas VIII untuk tahun pelajaran kemarin. Karena keterbatasan orang tua yang petani dan kurang perhatian belajar di rumah bahkan sering membantu orang tua berkebun sehingga ada 5 mapel yang tidak mencapai batas tuntas KKM dan sering tidak masuk sekolah”.

c. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan standar-standar lainnya.

(1) Standar Proses Pendidikan (SPP) ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Artinya, proses pendidikan bagaimana yang harus dilakukan oleh guru harus sesuai dengan SKL dan SI.

(2) Efektivitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK) serta Standar Sarana Prasarana (SSP).

(3) Efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh Standar Penilaian (SP).

(4) Keberhasilan standar minimal pendidikan sangat tergantung Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Sri Hartono, S.Pd (CL. 6) bahwa :

“Sebagian besar guru telah memiliki perangkat pembelajaran lengkap berupa : Silabus, Prota, Promes, RPP, Daftar Nilai, Analisis Hasil Ulangan, Program Remediasi, Soal-soal evaluasi harian maupun semester sebagai dokumen bank soal. Dalam proses pembelajaran sebagian besar guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT dengan media *power point*, video, dan internet. Bahkan dalam proses pembelajaran IPA Biologi guru juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk pembelajaran”.

Berdasarkan observasi partisipatif catatan lapangan Nomor 22 (CL.22) pada hari Sabtu tanggal 6 November 2010 di kelas 8A, bahwa :

1. Bapak Giyadi, S.Pd memanfaatkan Laboratorium IPA untuk pembelajaran Biologi dengan Kompetensi Dasar (KD) Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan.

Sedangkan,

2. Ibu Dra. Sri Sumarni menggunakan Ruang Multi Media untuk pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8B dengan KD Menganalisis unsur-unsur intrinsik prosa.

Hasil observasi tersebut diperkuat dengan data hasil wawancara dengan Bapak/ Ibu Guru SMP Negeri 2 Jatisrono. Berikut ini hasil wawancara dengan Partanto, S. Pd catatan lapangan nomor 8 (CL. 8), sebagai berikut :

“Perangkat pembelajaran sudah merupakan perangkat guru yang wajib dimiliki, sehingga bapak/ ibu guru di sini sudah lengkap memiliki semua, termasuk saya. Adapun pembuatannya dilakukan bersama-sama pada awal tahun pelajaran melalui kegiatan *work shop*, selanjutnya diselesaikan oleh masing-masing bapak/ ibu guru. Sebagian guru yang sedang mengikuti Kegiatan MGMP seperti Mata Pelajaran Bahasa Inggris dalam kegiatan tersebut antara lain juga menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih baik”.

“Selain itu sebagian besar bapak dan ibu guru di sini dalam proses pembelajaran juga sering memanfaatkan perpustakaan, laboratorium bahasa, dan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran”.

Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Giyadi, S.Pd. seorang guru yang mengampu Mata Pelajaran IPA, catatan lapangan Nomor 9a (CL. 9a), sebagai berikut :

“Saya memanfaatkan Laboratorium IPA cukup sering, karena materi pembelajaran IPA pada kompetensi dasar tertentu memang harus melalui kegiatan di laboratorium. Jadi siswa benar-benar memahami dan mengalami melalui praktik”.

Pemanfaatan Ruang Multi Media dapat diperoleh keterangan dari Dra. Sri Sumarni yang mengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, catatan lapangan Nomor 9b, sebagai berikut :

“Pembelajaran Bahasa Indonesia agar dapat lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa untuk kompetensi dasar (KD) Menganalisis unsur-unsur intrinsik prosa lebih baik saya putar film. Ruang Multi Media memiliki beberapa judul film yang sesuai untuk pembelajaran. Salah satunya adalah judul film “ Laskar Pelangi “. Setelah siswa melihat film tersebut (meskipun tidak harus selesai keseluruhan cerita) tetapi siswa sudah dapat menyebutkan setting cerita, karakter tokoh, tema, dan lainnya”.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Jatisrono secara umum telah memenuhi standar pendidik dan kependidikan seperti yang disebutkan dalam standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah standar nasional (SSN) harus mempunyai kepala sekolah, guru, guru BK, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga kebersihan.

Kualifikasi akademik pendidikan minimum untuk pendidik pada tingkat SMP adalah diploma empat (D-4) atau sarjana (S1). Sedangkan tenaga pendidik SMP Negeri 2 Jatisrono yang sudah bersertifikasi pendidik sebanyak 20 guru atau sebesar 53% dari jumlah guru ada. Kualifikasi akademik Tenaga Pendidik SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan dokumen catatan lapangan nomor 10a (CL. 10a) adalah :

Tenaga Pendidik SMP Negeri 2 Jatisrono yang telah berpendidikan Sarjana (S1) berikut ini mengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia adalah Dra. Sri Sumarni, Sri Rejeki, S.Pd. Sri Rejeki, S.Pd.; Mata Pelajaran Bahasa Inggris adalah Partanto, S.Pd.,

Sri Sulastri, S.Pd., Sulis Titik W. , S.Pd. , Nova Wistarina, S.Pd., Sri Mulyani, S.Pd.; Mata Pelajaran Matematika adalah S. Marsono, S.Pd., Tiyono, S.Pd. , Harianto, S.Pd., Desi Prasetyowati, S.Pd.; Mata Pelajaran IPA adalah Sri Hartono, S.Pd. Asmuni, S.Pd. , Giyadi, S.Pd., Samsudin, S.Pd., Yuni Safitri, S.Pd.; Mata Pelajaran IPS adalah Dra. Endang SP. , Isdwi Astuti, S.Pd. , Drs. Warsito , Dra. Supadmini; Mata Pelajaran PKn adalah Dra. Endang Winarni, Isdwi Astuti, S.Pd.; Mata Pelajaran Agama adalah Ramlan, S.Pd. Sutrisno, S.Pd., Eni Lestari, S.Ag.; Mata Pelajaran Bahasa Jawa adalah Susilowati, S.Pd. , Sugiman; Mata Pelajaran Penjasorkes adalah Santo, S.Pd. , Sutarto, S.Pd.; Mata Pelajaran Tikom adalah Nova Wistarina, S.Pd. , Heriyus Kristiyanto, ST , Yossi Firman Prabawa, S.Pd.; Bimbingan Konseling adalah Dra. Ninuk Dwi Sutartini, Drs. Sujatno , Sri Widiyani, S.Pd., Sutarto, S.Pd. Endri Sugiharto; Mata Pelajaran Seni Budaya adalah Sugiman , Tri Sutini, S.Pd.; Mata Pelajaran Elektronika adalah Purwani Rahayu, S.Pd. Bambang Tri S ,S.Si.

Dari 39 tenaga pendidik SMP Negeri 2 Jatisrono masih terdapat seorang tenaga pendidik yang berpendidikan Diploma 2 yaitu Sugiman dan mengampu mata pelajaran Seni Budaya.

Adapun dari sejumlah 39 guru di SMP Negeri 2 Jatisrono sebanyak 20 guru telah berstatus sebagai guru profesional dengan memiliki sertifikat pendidik melalui program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal tersebut diperoleh keterangan dari wawancara dengan Kepala Sekolah Dra. Ninuk Dwi Sutartini catatan lapangan nomor 10b (CL. 10b) sebagai berikut :

commit to user

“Guru SMP Negeri 2 Jatisrono yang telah mengikuti sertifikasi berjumlah 20 orang adalah : Dra. Ninuk Dwi Sutartini, Dra. Endang. SP, S. Marsono, S.Pd, Tiyono, S. Pd., Partanto, S.Pd., Drs. Sujatno, Isdwi Astuti, S.Pd., Ramlan, S.Pd., Drs. Warsito, S.Pd., Dra. Supadmini, Sri Widiyani, S.Pd., Tri Sutini, S.Pd., Sri Hartono, S.Pd., Santo, S.Pd., Sri Sulastri,S.Pd., Asmuni,S.Pd., Sulis Titik W, S.Pd., Susilowati, S.Pd., Giyadi, S.Pd., Dra. Sri Sumarni. Bapak Ibu guru tersebut memiliki sertifikat pendidik profesional sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di kelas”.

Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Jatisrono berjumlah 16 orang yang terbagi menjadi : 5 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 11 orang berstatus honorer. Adapun kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan tersebut adalah : SMP 4 orang, SMA 10 orang, Sarjana 2 orang.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program SSN di SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan wawancara catatan lapangan nomor 17 (CL. 17) dengan Partanto, S.Pd, menjelaskan bahwa :

“Bapak/Ibu Guru di sini setiap semester menerima pembinaan dari Pengawas Pendidikan juga diadakan pelatihan pemanfaatan media pembelajaran bahkan untuk meningkatkan pengetahuan sekolah mengadakan studi banding ke SSN SMP Negeri 4 Denpasar Bali pada tanggal 21 Desember 2009.”

e. **Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) SMP Negeri 2 Jatisrono setiap tahunnya telah menambah beberapa fasilitas sekolah baik berupa bangunan gedung maupun perangkat sekolah yang lain.

Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki berdasarkan obsevasi dan dokumen profil sekolah catatan lapangan No. 11a (CL.11a), SMP Negeri 2 Jatisrono memiliki fasilitas sekolah, meliputi :

Tabel 6
Fasilitas Ruang dan Lahan

commit to user

No.	Ruang/ Lahan	Luas Nyata (m2)	Luas Ideal (m2)	Keterangan
1	Ruang Kelas (17)	63	63	Ideal
2	Perpustakaan	126	126	Ideal
3	Laboratorium IPA	120	120	Ideal
4	Laboratorium Bahasa	120	120	Ideal
5	Ruang Multi Media	63	120	Kurang
6	Ruang Kepala Sekolah	20	21	Ideal
7	Ruang Wakil Kepala Sekolah	12	15	Kurang
8	Ruang Guru	70	70	Ideal
9	Ruang Ketrampilan	120	120	Ideal
10	Ruang Tata Usaha	60	42	Ideal
11	Ruang BK	24	24	Ideal
12	Ruang UKS	24	24	Ideal
13	Mushola/R.Ibadah	45	72	Kurang
14	Ruang OSIS	24	24	Ideal
15	Ruang Pramuka/PMR	24	24	Ideal
16	Ruang Ganti OR	15	21	Kurang
17	Dapur	20	21	Ideal
18	KM/WC Siswa	3	3	Ideal
19	KM/WC Guru	3	3	Ideal
20	Ruang Koperasi	20	21	Ideal
21	Taman Bacaan	30	-	Ideal
22	Ruang Tamu	20	21	Ideal
23	Ruang Komputer	21	-	Ideal
24	Taman Sekolah	150	-	Ideal
25	Lapangan Sepak Bola	600	-	Ideal
26	Lapangan Basket	200	-	Ideal
27	Lapangan Voli	150	-	Ideal
28	Lapangan Bulu Tangkis	150	-	Ideal
29	Kantin	24	21	Ideal
30	Menara Air	1	-	Ideal
31	Pos Jaga	6	4	Ideal
32	Tempat Parkir	60	36	Ideal
33	Kebun	2800	-	Ideal
34	Halaman Sekolah	150	-	Ideal

Sebagai sekolah Tipe B dengan jumlah 17 rombel SMP Negeri 2

Jatisrono memiliki fasilitas yang telah memenuhi standar, meliputi :

commit to user

Ruang Kelas (sebanyak 17), Ruang Perpustakaan, Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Ruang Multi Media, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Ketrampilan, Ruang Tata Usaha, Ruang BK, Ruang UKS, Mushola, Ruang OSIS, Ruang Pramuka/PMR, Ruang Ganti, Dapur, KM/WC Siswa, KM/WC Guru, Ruang Koperasi, Taman Bacaan, Lobi/ Hall, Ruang Komputer, Taman Sekolah, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Basket, Lapangan Voli, Lapangan Bulu Tangkis, Kantin, Menara Air, Pos Jaga, Tempat Parkir, Kebun, dan Halaman Sekolah.

Berdasarkan wawancara dan observasi partisipatif dengan Bapak Sri Hartono (Komite Sekolah) catatan lapangan No. 11b (CL. 11b), bahwa keadaan SMP Negeri 2 Jatisrono adalah sebagai berikut :

“Sebagai sekolah Tipe B 1, fasilitas bangunan dan sarana yang lain di SMP Negeri 2 Jatisrono sudah ideal sesuai standar dan memadai untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Kondisi tanah/ lahan SMP Negeri 2 Jatisrono yang sebagian miring justru menjadikan suasana sekolah sangat menarik. Untuk jalan yang menuju ke beberapa kopel bangunan lain harus dibuat jalan dengan trap/ bertingkat. Di sisi kanan kirinya taman yang memanjang sangat terawat. Bahkan SMP Negeri 2 Jatisrono telah memiliki lokasi taman bacaan. Taman bacaan tersebut berdampingan dengan ruang perpustakaan yang dibuat di areal terbuka yang cukup teduh untuk membaca. Taman tersebut dibuat seperti tribun sehingga dapat menampung siswa untuk membaca cukup leluasa”.

Berdasarkan catatan lapangan No. 11a Standar Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 2 Jatisrono sudah memenuhi kriteria standar nasional yaitu telah terpenuhinya fasilitas dan bangunan sekolah seperti yang tercantum pada buku pedoman standarisasi.

e. Standar Pengelolaan Pendidikan

Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan SMP Negeri 2 Jatisrono telah dilaksanakan berpedoman kepada rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rinci dari rencana kegiatan jangka menengah yang meliputi masa 5 tahun. Pelaksanaan pengelolaan tersebut dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

SMP Negeri 2 Jatisrono dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan dikonsultasikan dengan rapat dewan guru dan komite sekolah. Sedangkan apabila ada kegiatan yang perlu atau mendesak tetapi tidak diprogramkan dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan secara *ad hoc* dan bertanggung jawab, namun terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari dewan guru dan komite sekolah. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Sekolah catatan lapangan No. 10c (CL. 10c), sebagai berikut :

“Kami dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada rencana kerja sekolah (RKS) yang telah disusun dan mendapat pengesahan dari Komite Sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi komunikasi dan konsultasi selalu dilaksanakan”.

Rencana kerja yang telah disusun dan dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Jatisrono berdasarkan hasil dokumentasi catatan lapangan No. 12a (CL. 12a) meliputi :

Kurikulum KTSP, Kalender Pendidikan, Jadwal Pelajaran, Pembagian Tugas Mengajar, Pembagian Tugas Pembantu Kepala Sekolah, Pembagian Tugas

commit to user

Koordinator Pengembangan Diri, Pembagian Tugas Piket, Pembagian Tugas Tim Penyusun Kurikulum, Pembagian Tugas TU, Struktur Organisasi, Jadwal Ulangan Tengah Semester/ Akhir Semester, Jadwal Kegiatan Ekstra/ Pengembangan Diri, Jadwal Penggunaan Laboratorium (IPA, Bahasa, dan Komputer), Jadwal MGMP Sekolah, Tata Tertib Guru, Tata Tertib Siswa, Jadwal Rapat Komite, Penggunaan dan Pemeliharaan Sarpras.

Pengawasan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatisrono meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Pemantauan dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan oleh Kepala Sekolah dan Tim Khusus serta Komite Sekolah. Pemantauan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sekolah berdasarkan dokumen catatan lapangan nomor 12b (CL. 12b).

Supervisi yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatisrono telah dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan. Supervisi yang dilaksanakan meliputi supervisi manajerial dan supervisi akademik yang dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Pedoman Program Penjamin Mutu dari Depdiknas.

SMP Negeri 2 Jatisrono telah melaksanakan dan memberikan laporan yang ditujukan kepada beberapa pihak antara lain, laporan oleh guru yang ditujukan kepada kepala sekolah dan orang tua/ wali siswa, berisi hasil evaluasi (ulangan) dan penilaian setiap akhir semester. Kepala Sekolah sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya setiap akhir semester juga memberikan laporan

kepada Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten, yang berisi hasil evaluasi .

Standar pengelolaan pendidikan yang mengelola delapan standar nasional pendidikan (SNP) telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Jatisrono sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Sri Hartono, S.Pd catatan lapangan (CL No. 13), menyatakan bahwa :

“Laporan hasil evaluasi yang disampaikan kepada orang tua siswa meliputi laporan hasil ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Setiap semester bapak ibu guru telah disupervisi oleh kepala sekolah pada saat pembelajaran di kelas. Juga supervisi manajerial terhadap perpustakaan, laboratorium, kepegawaian, dan kesiswaan dilakukan oleh Kepala Sekolah. Bahkan supervisi juga dilakukan oleh Pengawas Pendidikan dan Monitoring Evaluasi (Money) dari Direktorat Pembinaan SMP”.

f. Standar Pembiayaan Pendidikan

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan. SMP Negeri 2 Jatisrono melaksanakan pembiayaan pendidikan meliputi : biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Berdasarkan hasil observasi partisipatif catatan lapangan No. 14a (CL. 14a) bahwa:

Standar pembiayaan pendidikan SSN SMP Negeri 2 Jatisrono dilaksanakan dengan program kegiatan :

(1) Pengembangan dokumen pembiayaan, dengan program :

(a) Penyusunan petunjuk pelaporan

- (b) Pembuatan laporan
 - (c) Dokumen pendukung laporan
 - (d) Pengembangan pelaksanaan laporan
- (2) Pengembangan kemitraan, dengan program :
- (a) Pengembangan jaringan dengan orang tua/ komite
 - (b) Pengembangan jaringan dengan dunia usaha/ sponsor
 - (c) Rapat guru dan karyawan untuk menggali sumber dana
 - (d) Pengembangan pelaksanaan pelaporan.

Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Ibu Mulyati catatan lapangan No.14b (CL.14b), menjelaskan bahwa :

“SSN SMP Negeri 2 Jatisrono memiliki dukungan sumber dana yang cukup baik yang berasal dari pemerintah pusat (*block grant* SSN), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, komite sekolah, sponsor, serta sumber dana dari sekolah sendiri. Adapun penggunaan dana telah dipertanggung jawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga penggunaannya dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah”.

g. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Jatisrono dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemampuan, dan kemajuan hasil belajar. Indikator dalam standar penilaian pendidikan yang dilaksanakan meliputi: perangkat penilaian, pelaksanaan penilaian, dan hasil belajar. Penilaian hasil belajar berdasarkan catatan lapangan nomor 13 (CL. 13).

Perangkat penilaian meliputi kisi-kisi soal, soal-soal, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Perangkat tersebut telah dimiliki oleh semua guru berdasarkan catatan lapangan nomor 6 (CL No.6).

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sepanjang semester dengan teknik penilaian secara individu, secara kelompok, dan ulangan umum/ bersama yang dibuat oleh MGMP Tingkat Kabupaten.

Hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan wawancara catatan lapangan No. 16a (CL.16a) Dra. Supadmini, menyatakan bahwa :

“Peserta didik untuk setiap mata pelajaran harus mencapai KKM, apabila ada peserta didik yang belum mencapai batas KKM harus diberikan program remediasi sampai mencapai batas tuntas KKM.”

Untuk kenaikan kelas dilaksanakan berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang sejak awal tahun pelajaran disosialisasikan kepada peserta didik. Berikut catatan lapangan No. 16b hasil wawancara dengan Urusan Kurikulum 2 Dra. Supadmini, menjelaskan bahwa :

“Siswa dinyatakan naik kelas apabila semua mata pelajaran \geq KKM masing-masing mata pelajaran.

Siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 95% dari jumlah hari masuk efektif, yang diperhitungkan tidak hadir tanpa keterangan.

Siswa dinyatakan naik kelas apabila nilai kepribadian sekurang-kurangnya Baik (B), yang berasal dari penilaian seluruh mata pelajaran.

Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran dan atau memiliki nilai \leq 50.

Siswa dinyatakan naik kelas apabila mengikuti seluruh aspek penilaian.”

2. Kendala dan Cara Mengatasi Pelaksanaan Program SSN

commit to user

Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono, berdasarkan wawancara dan observasi partisipatif catatan lapangan nomor 11b (CL. 11b) adalah :

- a. Standar sarana dan prasarana sekolah khususnya media pembelajaran yang belum mencukupi secara ideal, adalah : LCD, TV/ Video Kelas, Buku Teks, Buku Perpustakaan, dan Alat Peraga Pembelajaran.
- b. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu sebagian SDM guru dan karyawan belum sepenuhnya memahami program sekolah standar nasional (SSN), karena belum seluruhnya mendapatkan pelatihan tentang program SSN secara menyeluruh. Hal ini berdasarkan wawancara dan observasi partisipatif catatan lapangan nomor 17 (CL. 17)

Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi kendala pada Standar Sarana dan prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono, yaitu dengan cara :

- a. Menggunakan LCD secara bergantian (meskipun suatu ketika dalam waktu bersamaan beberapa guru sebaiknya menggunakan LCD dalam pembelajaran),
- b. Menggunakan ruang multi media berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh penanggung jawab ruang multi media,
- c. Buku teks pelajaran untuk mata pelajaran tertentu dipergunakan secara bergilir/ bergantian karena jumlahnya belum mencukupi,

- d. Peminjaman buku perpustakaan kepada siswa dibatasi selama 3 hari harus dikembalikan,
- e. Alat peraga pembelajaran paling banyak untuk mata pelajaran IPA sedangkan mata pelajaran lain belum lengkap, sehingga beberapa guru berusaha membuat sendiri meskipun dalam bentuk sederhana,
- f. Pemanfaatan laboratorium IPA maupun Bahasa supaya tidak bersamaan dibuatkan jadwal penggunaan secara khusus.
- g. Memberikan sosialisasi program SSN dengan mendatangkan Pengawas Pendidikan untuk memberikan pemahaman terhadap program SSN (*In House Training*) di SMP Negeri 2 Jatisrono dan melakukan studi banding ke sekolah SSN. Berdasarkan wawancara catatan lapangan nomor 17 (CL. 17).

3..Dampak Positif Pelaksanaan SSN dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

(1). *Input* Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono

Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP Negeri 2 Jatisrono setiap tahun meningkat karena telah memiliki status SSN. Hal ini dapat diketahui dari dokumen data calon peserta didik baru yang mendaftarkan semakin bertambah. Silvi Rahayu adalah pendaftar dengan nilai UASBN tertinggi (28,40) yang berasal dari SD Negeri 2 Tasikhargo, sedangkan Hesti Mawardani adalah pendaftar yang diterima dengan nilai UASBN terrendah (22,90) berasal dari SD Negeri 2 Tanjungsari.

Adapun nilai UASBN peserta juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan berdasarkan catatan lapangan No.7a (CL.7a), hasil wawancara dengan Partanto, S. Pd Ketua PPDB SMP Negeri 2 Jatisrono Tahun 2010/ 2011.

“Tahun pelajaran 2010/ 2011 ini mengalami peningkatan bagi siswa yang diterima paling rendah nilai UASBN adalah 22,90 sedangkan paling tinggi nilai UASBN adalah 28,40. Hal ini ada anggapan dari masyarakat bahwa SMP Negeri 2 Jatisrono telah memiliki status SSN sehingga yang berani mendaftarkan hanya yang memiliki nilai UASBN SD tinggi.”

Sistem seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan sistem berdasarkan peringkat nilai. Berikut adalah dokumen catatan lapangan nomor 7b (CL. 7b) sebagai berikut:

Rata-rata nilai UASBN SD/ MI untuk tiga mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika yang dinyatakan dalam bentuk SKHUN ditambah dengan Nilai Bonus Prestasi yang dinyatakan dengan Sertifikat/ Piagam. Nilai bonus prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai. Nilai bonus prestasi diatur sebagai berikut : Tingkat kejuaraan internasional langsung diterima; Tingkat kejuaraan nasional juara 1 langsung diterima, juara 2 nilai bonus (2.75) dan juara 3 nilai bonus (2.50); Tingkat kejuaraan propinsi juara 1 nilai bonus (2.25), juara 2 (2.00), juara 3 (1.75); Tingkat kejuaraan kabupaten/ kota juara 1 (1.50), juara 2 (1.25), juara 3 (1.00); dan Tingkat kejuaraan kecamatan juara 1 (0.75), juara 2 (0.50), juara 3 (0.25).

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 2 Jatisrono tahun pelajaran 2010/2011 menerima sejumlah 195 peserta didik baru yang disesuaikan dengan daya

tampung sekolah yaitu 6 kelas (rombel). Adapun tahapan pendaftaran berdasarkan catatan lapangan nomor 7b (CL. 7b) sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran dimulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 5 Juli 2010 dengan menyerahkan SKHUN asli.
- (2) Analisis dan penyusunan peringkat dilaksanakan secara transparan, setiap hari ditampilkan dalam jurnal secara langsung menggunakan LCD proyektor.
- (3) Pengumuman hasil seleksi PPDB.
- (4) Pelaksanaan daftar ulang.
- (5) Masuk pembagian kelas untuk Masa Orientasi Siswa (MOS).

Data penerimaan peserta didik baru berdasarkan dokumen catatan lapangan nomor 7c (CL. 7c) adalah :

Tabel 7

Data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
SMP Negeri 2 Jatisrono
Tahun Pelajaran 2010/ 2011

Data PPDB

Tahun	Jumlah Pendaftar			Jumlah Mengundurkan Diri			Jumlah yang Diterima		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2008/09	140	145	285	42	43	85	98	102	200
2009/10	124	97	221	32	18	50	92	69	161
2010/11	162	116	278	43	40	83	103	92	195

PPDB 2010/2011

No	Nama	No.Pendaftaran	Nilai			Jumlah	Ket.
			B.Ind	Mat	IPA		
1	Silvi Rahayu	023.057	9,40	9,50	9,50	28,40	Tertinggi diterima
195	Hesti M.	023.204	8,40	6,75	7,75	22,90	Terendah diterima

(2). *Out put* Pelaksanaan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono

Prestasi akademik yang dicapai SMP Negeri 2 Jatisrono setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut merupakan hasil sebuah proses yang dilaksanakan dengan terprogram dan keseriusan seluruh *steak holder* SMP Negeri 2 Jatisrono. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil nilai Ujian Nasional (UN) yang selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan rata-rata sekolah hasil Ujian Nasional. Tahun pelajaran 2007/2008 rata-rata 4 mata pelajaran 7.22, Tahun pelajaran 2008/ 2009 rata-rata 4 mata pelajaran 7.53, dan pada tahun pelajaran 2009/ 2010 rata-rata 4 mata pelajaran sebesar 7.57 berdasarkan dokumen catatan lapangan nomor 15a (CL.15a).

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang sangat menarik tentang upaya yang dilakukan agar meningkat perolehan nilai rata-rata sekolah untuk Ujian Nasional (UN) di SMP Negeri 2 Jatisrono. Pernyataan ini berdasarkan catatan lapangan No. 15b (CL.15b) hasil wawancara dengan Giyadi, S. Pd selaku urusan Kurikulum, menyatakan bahwa :

commit to user

“Sekolah melakukan beberapa upaya terhadap siswa kelas IX untuk meningkatkan hasil ujian nasional (UN) melalui : (a) Percepatan materi pelajaran sejak bulan Oktober 2010 telah dilaksanakan dari pukul 13.30-15.30. (b) Uji coba UN tingkat sekolah 1 kali. (c) Memberikan ‘menu sarapan pagi soal’. (d) Mengadakan Uji coba tingkat Sub Rayon 5 kali. (e) Mengadakan ‘tray out’ bersama lembaga bimbingan belajar (bimbel). (f) Mengadakan uji coba soal-soal dari 10 kabupaten/ kota. (g) Mengadakan uji coba UN tingkat Kabupaten”.

“Dengan upaya tersebut dan didukung oleh seluruh warga sekolah upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang nyata telah dibuktikan dari perolehan nilai rata-rata UN dan peringkat sekolah berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN) yang selalu meningkat.”

Prestasi akademik SMP Negeri 2 Jatisrono untuk tiga tahun ke belakang selalu meningkat perolehan rata-rata nilai ujian nasional (UN). Dibawah ini adalah dokumen berdasarkan catatan lapangan nomor 15a (CL. 15a).

Tabel 8

Prestasi Akademik Nilai Ujian Nasional (UN)

No	Tahun Pelajaran	Rata-Rata NUAN					
		Bhs Indonesia	Mate matika	Bhs Inggris	IPA	Jumlah	Rata-rata empat
1	2007/2008	7.51	7.88	6.82	7.22	29.43	7.22
2	2008/2009	7.87	8.25	6.55	7.47	30.14	7.53
3	2009/2010	8.17	7.50	6.98	7.64	30.29	7.57

Berdasarkan catatan lapangan No. 18 (CL.18), hasil wawancara dengan Partanto, S.Pd salah seorang panitia ujian SMP Negeri 2 Jatisrono, menyatakan bahwa :

“Setiap tahunnya siswa SMP Negeri 2 Jatisrono selalu ada yang mendapatkan nilai 10 untuk nilai ujian nasional (UN). Tahun pelajaran 2008/ 2009 Muhammad Adiansyah, Rohimma Handayani, Ayuk Angrestian, dan Sriyani (4 siswa) mendapat nilai 10 Mapel Matematika. Tahun pelajaran 2009/ 2010 Deni Arif Irawan, Ida Riani Kusumaningsih, dan Ridho Rusian (3 siswa) mendapatkan nilai 10 Mapel Matematika. Setiap tahunnya bagi siswa yang mendapatkan prestasi akademik nilai 10 untuk maple UN setiap mapel diberi penghargaan sebesar Rp 50.000,00 sebagai hadiah dari sekolah”.

Berikut adalah dokumen catatan lapangan nomor 19 (CL.19), adalah :

Tabel 9

Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah (US)

No	Mata Pelajaran	Rata-rata nilai US		
		Tahun 2007/2008	Tahun 2008/2009	Tahun 2009/2010
1	Pend. Agama	7.75	7.73	7.85
2	PKn	7.16	7.91	7.56
3	Bahasa Indonesia	-	-	-
4	Matematika	-	-	-
5	Bahasa Inggris	-	-	-
6	IPA	-	-	-
7	IPS	7.31	6.98	7.12
8	Seni Budaya	7.91	8.01	7.79
9	Penjasorkes	7.55	7.86	7.52
10	Bahasa Jawa	8.39	7.52	8.54
11	Tata boga	-	-	-
12	Tikom	7.53	7.87	7.70
13	Elektronika	8.08	7.85	7.67

Tabel 10

Data Kelulusan
SMP Negeri 2 Jatisrono

Tahun	Jumlah	Lulus				Tidak Lulus				Ket.
		L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
2008/09	193	99	94	193	100	-	-	-	0	
2009/10	189	86	103	188	99,1	1	-	1	0,99	

Selain prestasi akademik, SMP Negeri 2 Jatisrono juga mengalami peningkatan lulusan yang berhasil diterima di sekolah favorit di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data penelusuran kelulusan tahun 2009/ 2010 siswa yang diterima di RSBI SMA Negeri 2 Wonogiri adalah : Septia Putri. W (Kelas IXC), Klaudia Riska (Kelas IXE), dan Tiwi Kartika (Kelas IXE).

Siswa yang berhasil diterima di SMK Negeri 1 Wonogiri adalah : Anissa, Bella Ariska, Nindia Putri, Eiwinda, Evinur Vita, Santika Dewi, Wulandari, Selly Oktaviani, Sari Aifah, dan Sinta Vionika. Sedangkan yang berhasil diterima di SMK Negeri 2 Wonogiri adalah : Lukas Maulana, Rahmat Adi, Yoga Febria, Derik Santoso, Rifandi, Bachtiar Rizki, Fendi Suharmanto, Oktafo Gundi, Panji Eko.S, Budi Utomo, Rio Aditya, Teguh Purwanto, Adi Cahyo, Bastian Kurniawan, dan Fahreza. Hasil observasi catatan lapangan nomor 20a (CL. 20a).

Hal tersebut diperjelas oleh Guru BK Sri Widiyani, S. Pd dalam wawancara (CL No. 20b), sebagai berikut :

“Meskipun input SMP Negeri 2 Jatisrono tidak begitu tinggi jika dibanding dengan input SMP Negeri 1 Jatisrono atau SMP Negeri 1 Sidoharjo, namun kenyataannya lulusan SMP Negeri 2 Jatisrono yang diterima di sekolah favorit di Wonogiri setiap tahunnya meningkat. Bahkan tahun ini ada 3 siswa yang berhasil diterima di RSBI SMA Negeri 2 Wonogiri. Selain itu juga banyak yang diterima di SMK Negeri di Wonogiri dan SMA Negeri Jatisrono.”

Untuk prestasi non akademik SMP Negeri 2 Jatisrono telah berhasil mencapai juara II tingkat Karesidenan Surakarta untuk Kejuaraan Pencak Silat atas nama Dafid Nurahman. Berikut adalah daftar siswa yang telah berhasil memperoleh prestasi non akademik berdasarkan catatan lapangan No. 21a (CL. 21a).

Tabel 11

Prestasi Siswa Bidang Non Akademik
Tahun 2009/ 2010

No.	Nama Siswa	Jenis Kegiatan/ Lomba	Tingkat	Perolehan Juara
1	Santika Dewi	MAPSI	Kabupaten	Juara I
2	Dewi	MAPSI	Kabupaten	Juara I
3	Dewi Septi	KIR	Kabupaten	Harapan I
4	Rizki. A	KIR	Kabupaten	Harapan I
5	Santika Dewi	Story Telling	Kabupaten	Harapan II
6	Donik Febri. L	Tolak Peluru	Kabupaten	Juara I
7	Monita Eko	Tolak Peluru	Kabupaten	Juara III
8	Dafid Nur Rahman	Pencak Silat	Kabupaten	Juara I
9	Putri	Renang	Kabupaten	Juara I
10	Widiastuti. KW	Renang 50 M	Kabupaten	Juara I
11	Rahmat. S	MTQ	Kecamatan	Juara I
12	Mutmainah	Qiroah	Kecamatan	Juara III
13	Dafid Nur Rahman	Pencak Silat	Karesidenan	Juara III

Berdasarkan hasil wawancara dengan Urusan Kesiswaan/ Pembina OSIS SMP Negeri 2 Jatisrono Santo, S. Pd (CL. No. 21b)

“Penghargaan dari sekolah untuk siswa yang berhasil mendapatkan juara I Kabupaten diberi hadiah uang Rp 150.000,00. Juara II diberi hadiah uang Rp 125.000,00. Juara III diberi hadiah uang Rp 100.000,00. Sedangkan untuk tingkat Kecamatan Juara I mendapat hadiah uang sebesar Rp 75.000,00. Juara II mendapat hadiah uang Rp 50.000,00 dan Juara III mendapat hadiah uang sebesar Rp 25.000,00”.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada uraian- uraian sebelumnya peneliti telah menyampaikan berbagai hasil temuan dalam penelitian di SMP Negeri 2 Jatisrono, agar data tersebut dapat

dikategorikan sebagai temuan yang baik maka peneliti menguraikan pembahasan dengan mengaitkan teori yang telah ada.

Berdasarkan data-data dan temuan dalam penelitian dapat dikemukakan teori, “Bahwa pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan (SNP) melalui program sekolah standar nasional (SSN) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, meliputi : standar isi pendidikan, standar kompetensi lulusan (SKL), standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta kemampuan sekolah dalam mengatasi kendala yang dijumpai, maka pelaksanaan program SSN dapat meningkatkan mutu pendidikan”.

Pembahasan penelitian akan memfokuskan pada implementasi program sekolah standar nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono yang telah dilaksanakan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

1. Standar Isi Pendidikan

Sekolah telah membuat dan memiliki dokumen KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan. Aspek dan indikatornya adalah : memiliki dokumen kurikulum, komponen KTSP, dan penyusunan/ pengembangan silabus.

Struktur dan muatan Kurikulum SMP Negeri 2 Jatisrono seperti yang tertuang dalam Standar Isi, meliputi lima kelompok mata pelajaran adalah :

commit to user

- a. Agama dan Akhlak Mulia, meliputi Pendidikan Agama ;
- b. Kewarganegaraan dan Kepribadian, meliputi Pendidikan Kewarganegaraan ;
- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Elektronika ;
- d. Estetika, meliputi Seni Budaya dan Bahasa Jawa ;
- e. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, meliputi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan sistem paket dengan beban belajar melalui sistem tatap muka sebanyak 42 jam pelajaran per minggu.

Pelaksanaan program SSN pada standar isi pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono telah sesuai dengan ketentuan, yaitu: standar isi pendidikan, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender pendidikan (Depdiknas, 2008 : 31).

2. Standar Kompetensi Lulusan

Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini melaksanakan

sistem belajar tuntas dengan ketentuan batas tuntas ditentukan oleh sekolah sendiri dengan nama Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sekolah telah melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem belajar tuntas. Peserta didik setiap mengikuti ulangan harian belum mencapai KKM dari mata pelajaran tertentu harus melakukan perbaikan/ remidiasi sampai tuntas KKM. Kenaikan kelas setiap akhir tahun pelajaran juga berpedoman pada kriteria kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik kelas IX dilaksanakan berdasarkan kriteria kelulusan (PP 19/ 2005 pasal 72 ayat 1) yang telah ditentukan.

Standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Depdiknas, 2008 : 44). Dengan demikian SMP Negeri 2 Jatisrono dalam pelaksanaan program SSN telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

3. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. SMP Negeri 2 Jatisrono telah memiliki perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, dan melakukan pengawasan.

Guru telah membuat dan memiliki perangkat pembelajaran mulai dari Silabus, Prota, Promes, RPP, dan bahan ajar seperti LKS yang telah disesuaikan oleh masing-masing guru.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan telah memanfaatkan media ICT seperti internet, *power point*, video, dan LCD agar pembelajaran lebih menarik. Para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran juga sudah menerapkan model pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).

Guru telah melakukan penilaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu : aspek *kognitif*, aspek *afektif*, dan aspek *psikomotorik* di sepanjang semester baik secara individual maupun secara kelompok.

Sekolah telah membuat jadwal untuk penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan ruang ketrampilan agar penggunaannya lebih efektif. Laboratorium yang dimiliki adalah laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, dan Laboratorium Komputer. Selain itu sekolah juga telah membuat jadwal mata pelajaran, jadwal pelajaran tambahan, jadwal pengembangan diri/ ekstra kurikuler, jadwal petugas upacara bendera siswa.

Pengawasan pembelajaran juga telah dilaksanakan secara terprogram dan intensif melalui pemantauan, supervisi pembelajaran, dan evaluasi.

Pelaksanaan standar proses pendidikan SMP Negeri 2 Jatisrono telah sesuai dengan standar proses pendidikan, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran

berlangsung yang diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Wina Sanjaya, 2006 : 4).

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan (termasuk SMP) dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta dimungkinkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Depdiknas, 2005 : 2)

Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang SMP meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2008 : 31).

Sebagai sekolah berstatus SSN SMP Negeri 2 Jatisrono telah memenuhi syarat sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan karena memiliki kepala sekolah, guru, bimbingan konseling, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga kebersihan. Kepala sekolah dan guru minimal pendidikan sarjana (S1), hanya satu orang guru masih berpendidikan diploma 2 (D2) namun saat ini masih menempuh kuliah di perguruan tinggi. Adapun tenaga pendidik yang dimiliki berjumlah 43 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 16 orang. Jumlah keseluruhan 59 orang pegawai. Guru bersertifikasi pendidik sejumlah 20 orang dan telah memiliki pengakuan sebagai guru professional pada bidang mata pelajaran yang diampu. Untuk guru yang telah bersertifikasi wajib mengajar 24 jam tatap muka setiap minggu dan melaksanakan semua administrasi pembelajaran dengan lengkap dan baik.

5. Standar Sarana dan Sarana Pendidikan

commit to user

Berdasarkan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana disebutkan bahwa sekolah yang berstatus SSN harus memiliki antara lain : satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan prasarana dan sarana (Depdiknas, 2005 : 3). Sedangkan sebagai sekolah dengan jumlah 15 rombel dan peserta didik maksimum 600 siswa sekolah tersebut sebagai SMP Tipe B. 1 (Depdiknas, 2005 : 30).

SMP Negeri 2 Jatisrono memiliki lahan/ tanah yang cukup memadai dengan luas 19.500 m² dan bangunan gedung seluas 3118 m² sedangkan kelengkapan prasarana dan sarana meliputi : Ruang Kelas (sebanyak 17), Ruang Perpustakaan, Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Ruang Multi Media, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Ketrampilan, Ruang Tata Usaha, Ruang BK, Ruang UKS, Mushola, Ruang OSIS, Ruang Pramuka/PMR, Ruang Ganti, Dapur, KM/WC Siswa, KM/WC Guru, Ruang Koperasi, Taman Bacaan, Lobi/ Hall, Ruang Komputer, Taman Sekolah, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Basket, Lapangan Voli, Lapangan Bulu Tangkis, Kantin, Menara Air, Pos Jaga, Tempat Parkir, Kebun, dan Halaman Sekolah.

Satuan pendidikan SMP Negeri 2 Jatisrono dengan memiliki 17 rombongan belajar (rombel) pada tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari : kelas VII (6 rombel), kelas VIII (5 rombel), dan kelas IX (6 rombel) dengan jumlah

siswa keseluruhan sebanyak 555 peserta didik adalah sekolah dengan Tipe B. 1, sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan standar sarana dan prasarana pendidikan.

6. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan program SSN telah memiliki perencanaan program antara lain : memiliki visi, misi, tujuan sekolah, dan rencana kerja sekolah (RKS). SMP Negeri 2 Jatisrono telah memiliki perencanaan program dan pelaksanaan pengembangan program sekolah yang terdiri dari KTSP, kaldik, dan perumusan pedoman sekolah. Pelaksanaan pengembangan struktur organisasi yaitu pemimpin, pendidik dan tenaga kependidikan telah mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan SMP menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan KTSP, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan (Depdiknas, 2008 : 49).

Pelaksanaan kegiatan sekolah SMP Negeri 2 Jatisrono, meliputi : program kerja tahunan, melaksanakan program kerja sama dengan instansi lain, pertemuan rutin antara guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan orang tua murid.

Pelaksanaan rencana kerja bidang kesiswaan meliputi penerimaan peserta didik baru, kenaikan kelas, pengembangan diri/ ekstra kurikuler, pembinaan siswa berprestasi, dan kerja sama dengan alumni.

Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan telah berpedoman kepada rencana kerja tahunan. Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan satuan pendidikan yang telah dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh kepala sekolah, komite sekolah, lembaga khusus, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan (Depdiknas, 2005 : 8). SMP Negeri 2 Jatisrono melaksanakan pembiayaan pendidikan meliputi : biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi termasuk untuk biaya penyediaan sarpras, dan pengembangan SDM. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasi satuan pendidikan

meliputi : gaji, bahan habis pakai, peralatan habis pakai, pemeliharaan sarpras, pajak listrik, telepon, air, transportasi, dan lain-lain.

SSN SMP Negeri 2 Jatisrono memiliki dukungan sumber dana yang cukup baik yang berasal dari pemerintah pusat (*block grant* SSN), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, komite sekolah, sponsor industri, serta sumber dana dari sekolah sendiri. Adapun penggunaan dana telah dipertanggung jawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga penggunaannya dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah.

8. Standar Penilaian Pendidikan

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Pasal 58 Ayat 1 menyebutkan bahwa, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. (UUSPN, 2003 : 31)

Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Aspek dan indikatornya adalah : perangkat penilaian, pelaksanaan penilaian, dan hasil penilaian

Penilaian digunakan untuk : menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, memperbaiki proses pembelajaran, dan menentukan kelulusan peserta didik (Depdiknas, 2008 : 54

). SMP Negeri 2 Jatisrono menerapkan sistem belajar tatap muka dengan belajar tuntas.

Hasil penilaian prestasi akademik yang dicapai SMP Negeri 2 Jatisrono setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil nilai Ujian Nasional (UN) yang selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan rata-rata sekolah. Tahun pelajaran 2007/2008 rata-rata 4 mata pelajaran 7.22, Tahun pelajaran 2008/2009 rata-rata 4 mata pelajaran 7.53, dan pada tahun pelajaran 2009/2010 rata-rata 4 mata pelajaran sebesar 7.57.

Selain hasil peningkatan rata-rata UN tersebut, SMP Negeri 2 Jatisrono selama tiga tahun berturut mengalami peningkatan peringkat sekolah se Kabupaten Wonogiri. Pada tahun pelajaran 2007/2008 peringkat 18 Kabupaten, tahun pelajaran 2008/2009 peringkat 16 Kabupaten, dan tahun pelajaran 2009/2010 peringkat 14 Kabupaten dari sejumlah 75 sekolah negeri di Kabupaten Wonogiri.

D. Keterbatasan Penelitian

Dengan selesainya penelitian mengenai Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono, peneliti menyadari masih ada beberapa permasalahan penelitian yang belum tersentuh atau kurang mendapatkan data secara lengkap. Untuk itu peneliti memandang perlu menginformasikan

keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian tersebut adalah :

1. Peneliti belum dapat menggambarkan secara menyeluruh dalam Standar Proses Pendidikan di SMP Negeri 2 Jatisrono karena peneliti hanya mengobservasi guru yang telah ditentukan (*key informan*) dan tidak melanjutkan observasi pada guru yang lain.
2. Peneliti tidak dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah setiap hari. Karena peneliti berada di sekolah berdasarkan jadwal yang telah disepakati, sehingga seperti kegiatan ekstra kurikuler, studi wisata, kemah pramuka/ persami, latihan dalam kepemimpinan (LDK), pesantren kilat, penyembelihan hewan kurban, dan kegiatan yang lain sehingga peneliti tidak dapat menggambarkan sejauh mana kegiatan tersebut berpengaruh terhadap prestasi peserta didik.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan tiga hal yaitu : simpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran-saran. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono”, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun simpulan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono telah dilaksanakan sesuai dengan program (Hasil Monev Tahun 2008 memperoleh nilai 346.00 dan Hasil Monev Tahun 2009 memperoleh nilai 356.58) dan telah memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP), yang meliputi : Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.
2. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Jatisrono, adalah : sarana dan prasarana sekolah yang belum mencukupi secara ideal (LCD, TV/ Video Kelas, Buku Teks, Buku Perpustakaan, dan Alat Peraga Pembelajaran).

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi kendala di SMP Negeri 2 Jatisrono, yaitu dengan cara :

- a. Menggunakan LCD secara bergantian (meskipun suatu ketika dalam waktu bersamaan beberapa guru sebaiknya menggunakan LCD dalam pembelajaran),
 - b. Menggunakan ruang multi media berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh penanggung jawab ruang multi media,
 - c. Buku teks pelajaran untuk mata pelajaran tertentu dipergunakan secara bergilir/ bergantian karena jumlahnya belum mencukupi,
 - d. Peminjaman buku perpustakaan kepada siswa dibatasi selama 3 hari harus dikembalikan,
 - e. Alat peraga pembelajaran paling banyak untuk mata pelajaran IPA sedangkan mata pelajaran lain belum lengkap, sehingga beberapa guru berusaha membuat sendiri meskipun dalam bentuk sederhana,
 - f. Pemanfaatan laboratorium IPA maupun Bahasa supaya tidak bersamaan dibuatkan jadwal penggunaan secara khusus.
3. Pelaksanaan Progam SSN SMP Negeri 2 Jatisrono mempunyai dampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan,hal tersebut dapat dilihat dari peringkat sekolah 3 tahun berturut-turut meningkat. Pada tahun 2007/2008 peringkat 18 Kabupaten, tahun 2008/2009 peringkat 16 Kabupaten, dan tahun 2009/2010

peringkat 14 Kabupaten. Kelulusan siswa (*output*) peserta Ujian Nasional (UN) setiap tahunnya lulus 100%. Selain itu berdasarkan data penelusuran kelulusan, siswa yang diterima di RSBI SMA Negeri Wonogiri dan SMK Negeri di Wonogiri semakin banyak dan sebagian besar diterima di SMA Negeri Jatisrono.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian ini dapat diimplementasikan untuk usaha meningkatkan mutu penyelenggaraan program sekolah standar nasional (SSN) di SMP agar dapat lebih berkembang dan lebih berprestasi baik prestasi akademik maupun non akademik dengan maksimal. Implementasi dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan delapan (8) standar nasional pendidikan (SNP) di SMP Negeri 2 Jatisrono, yaitu : standar isi pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sara dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Pelaksanaan program SSN SMP Negeri 2 Jatisrono ditujukan agar menjadi acuan sekolah lain di sekitarnya, maka pimpinan, seluruh guru, dan karyawan yang belum sepenuhnya memahami tentang program SSN agar diberi pelatihan tentang SSN secara menyeluruh.

Sarana dan prasarana pendidikan adalah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, khususnya sarana penunjang proses pembelajaran yang berbasis ICT dapat dilengkapi secara ideal sesuai standar.

C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program sekolah standar nasional (SSN) SMP Negeri 2 Jatisrono :

1. Pelaksanaan program SSN sudah baik dan telah memenuhi aturan yang disyaratkan, namun dalam pelaksanaan selanjutnya perlu ditingkatkan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan karena belum seluruhnya memahami program yang sedang dilaksanakan. Pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya menguasai ICT maka perlu diadakan pelatihan untuk mengejar ketinggalannya.
2. Dalam pembelajaran hendaknya pendidik/ guru harus selalu inovatif dan kreatif dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis ICT.
3. Penyelenggaraan program SSN SMP berdampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu kepada pemerintah agar setiap tahunnya menambah jumlah sekolah yang diberi program SSN.

4. Penyelenggaraan program SSN yang telah berlangsung 3 tahun hendaknya ditindaklanjuti dengan SSN Mandiri dan kedepan untuk dipersiapkan menuju ke sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
5. Kepada peneliti berikutnya, sebagai tindak lanjut dari penelitian implementasi sekolah standar nasional (SSN) SMP hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam hal Standar Penilaian, karena selama ini penilaian terhadap peserta didik dirasakan masih terlalu longgar sehingga jarang terjadi siswa yang tinggal kelas/ tidak naik.

